

# JURNAL PMI

**Media Pemikiran dan Pengembangan Masyarakat**

# JURNAL PMI

**Media Pemikiran dan Pengembangan Masyarakat**

**Penanggung Jawab:**

Ketua Jurusan PMI

**Dewan Penyunting:**

Prof. Dr. Nasrudin Harahap, Siti Syamsiatun, Ph.D,  
Dr. Waryono, Dr. Sriharini

**Pimpinan Redaksi:**

Pajar Hatma Indra Jaya

**Sekretaris Redaksi**

Siti Aminah

**Redaksi Pelaksana**

Suyanto, Abu Suhud, Azis Muslim, Afif Rifai, M. Fajrul M.

**Tata Usaha**

Suratiningsih

**Alamat Redaksi**

Gedung Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55221, Telp (0274) 515856

Jurnal PMI (Pengembangan Masyarakat Islam) diterbitkan pertama kali bulan September 2003 oleh Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, dan terbit dua kali dalam setahun: bulan Maret dan bulan September.

# JURNAL PMI

**Media Pemikiran dan Pengembangan Masyarakat**

## DAFTAR ISI

- PENGANTAR REDAKSI (v-vi)**
- BERANI RUGI: SEBUAH CERITA PEMIHAKAN PEMKAB BANTUL TERHADAP NASIB PETANI Pajar Hatma Indra Jaya dan Sulistyary Ardiyantika ( 1-17 )**
- BABONISASI SEBAGAI PROGRAM INOVATIF PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT Muhammad Nur Kholis dan Triharyono (19-32 )**
- STRATEGI PEMBERDAYAAN POSDAYA EDELWYS Muhammad Sofiandi dan Suyanto ( 33-46 )**
- KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT: KISAH BERKEMBANGNYA BATIK BANTUL Pajar Hatma Indra Jaya ( 47-62 )**
- UPAYA MENJAGA EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL: STUDI REVITALISASI PASAR PIYUNGAN BANTUL Eis Al Masitoh ( 63-78 )**
- KEBIJAKAN PEMKAB BANTUL DALAM MENANGANI MENJAMURNYA TOKO MODERN Tatik Setyorini ( 79-92 )**



# PENGANTAR REDAKSI

Jurnal PMI edisi kali ini cukup istimewa, karena *pertama* terbitan kali ini merupakan terbitan untuk menyongsong tahun kesepuluh Jurnal PMI. Sejak dihapuskannya dana bantuan bagi jurnal tingkat jurusan dari UIN Sunan Kalijaga maka geliat penerbitannya berkurang. Namun karena kesadaran bahwa jurnal merupakan satu wadah untuk penyebaran gagasan keilmuan maka kami perlu untuk mempertahankan keberadaan Jurnal PMI. Apalagi gairah meneliti di kalangan dosen dan mahasiswa semakin hari semakin meningkat. *Kedua*, terbitan edisi kali ini kami anggap istimewa karena merupakan rangkaian tulisan hasil penelitian tentang memotret kebijakan pengembangan masyarakat dari Pemkab Bantul, di mana satu paket tulisan telah diterbitkan di Jurnal Riset Daerah Kabupaten Bantul edisi Desember 2012. Dengan demikian jurnal ini merupakan kelanjutan terbitan jurnal tersebut, sehingga jika ingin mengetahui program-program pemberdayaan masyarakat di Bantul maka peneliti wajib membaca dua jurnal tersebut.

Tema utama dalam Jurnal PMI kali ini adalah memotret usaha-usaha yang dilakukan Pemkab Bantul dalam melakukan pengembangan masyarakat guna mencapai kesejahteraan. Di masa kepemimpinan Idham Samawi-Soemarno Prs dan Sri Surya Widati-Sumarno Prs pembangunan di Bantul menunjukkan prestasi yang luar biasa. Kebanggaan Masyarakat Bantul terhadap kota tercintanya naik, mereka tidak lagi malu menyebut Bantul ketika ditanya alamat rumahnya. Hal ini berbeda dengan 15 tahun yang lalu.

Ada enam tulisan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, alumnus, dan dosen Jurusan PMI. Tulisan pertama merupakan tulisan yang mengulas kebijakan Bantul terkait dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan

petani, yaitu kebijakan Pemkab Bantul untuk membeli hasil pertanian ketika harganya turun. Tulisan kedua berisi tentang kebijakan babonisasi yang pernah dipraktikan di Bantul. Tulisan ketiga tentang kiprah Posdaya Edelwesy Dusun Serut Bantul. Tulisan keempat tentang kebijakan revitalisasi terkait pengembangan usaha batik bantul. Tulisan kelima melihat usaha Pemkab Bantul dalam melakukan revitalisasi pasar tradisional dan tulisan terakhir berisi tentang usaha pemkab untuk melihat perlindungan toko modern dari persaingan yang cenderung liberal.

# BERANI RUGI: SEBUAH CERITA PEMIHAKAN PEMKAB BANTUL TERHADAP NASIB PETANI

Pajar Hatma Indra Jaya dan Sulistyary Ardiyantika<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi miskin. Oleh karena itu membantu petani bisa diartikan sebagai usaha pengentasan kemiskinan dan upaya melindungi kelompok yang lemah. Kesejahteraan petani tergantung dengan hasil panen dan harga komoditas. Tetapi seringkali terjadi, ketika petani memperoleh hasil panen yang melimpah, petani tetap saja tidak sejahtera karena harga penjualan produksi mereka sangat murah. Biaya produksi lebih mahal dari harga jual, akibatnya petani merugi. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi petani, salah satunya dilakukan oleh Pemkab Bantul dengan membuat kebijakan unik, yaitu membeli produk pertanian dengan harga melebihi harga pasaran ketika harga komoditas pertanian turun. Kebijakan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2002 dan tetap dilaksanakan sampai saat ini. Meskipun pemkab membeli dengan cara merugi toh kebijakan tersebut sampai sekarang tidak membuat mereka bangkrut.*

*Kata Kunci: Petani, Harga Murah, Kebijakan Pasca Panen.*

---

## **A. Latar Belakang**

Mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, namun sektor ini dianggap tidak menarik lagi. Hal ini nampak dari banyaknya komoditas pertanian Indonesia yang

---

<sup>1</sup> Dr. Pajar Hatma Indra Jaya adalah sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, F. Dakwah, UIN Sunan Kalijaga dan Sulistyary Ardiyantika merupakan mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

harus disediakan dengan cara impor, angka konversi lahan pertanian yang tinggi, dan ketidaksediaan anak petani untuk meneruskan pekerjaan ayah mereka (Agnes Sunartiningsih, 2004: 63, 203; Pajar Hatma Indra Jaya, 2003).

Situasi di atas juga terjadi di Bantul. Bantul merupakan salah satu kabupaten di D.I Yogyakarta yang mempunyai potensi unggul dalam bidang pertanian. Wilayah ini mempunyai kontur tanah yang relatif datar, subur, curah hujan teratur, dan juga mempunyai kesediaan air yang cukup. Lahan pertanian di Bantul juga masih cukup luas, yaitu mencapai 15.910 hektar. Dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani, maka sektor pertanian merupakan sektor yang tidak dapat diabaikan begitu saja (<http://www.bantulonline.com/2011/07/areal-pertanian-bantul-capai-15305.html>).

Hasil pertanian di Bantul cukup bervariasi mulai dari beras, cabai merah, kacang, kedelai, jagung, tembakau, dan juga bawang merah. Produksi padi di Bantul mampu mengalami surplus. Dalam hal produksi bawang merah dan lombok (cabai merah) di Kecamatan Sanden yang merupakan salah satu daerah sentra produk tersebut. Ketika harga cabai dan bawang merah tinggi petani memperoleh keuntungan besar, hal ini terlihat dengan meningkatnya pembelian motor baru oleh petani cabai. Akan tetapi jika harga anjlok, bawang di sawah dibiarkan membusuk tanpa dipanen karena biaya panen lebih tinggi dari harga jual.

Dengan demikian masalah mendasar yang selalu dihadapi para petani adalah penurunan harga ketika panen raya tiba. Situasi ini membuat petani merugi dan berdampak pada keberlanjutan usahanya. Rendahnya harga hasil pertanian di tingkat petani tidak selalu disebabkan oleh banyaknya penawaran (stok), namun seringkali terjadi karena permainan pedagang besar. Jika hal ini dibiarkan, dampak besar yang ditimbulkan dapat menambah angka kemiskinan di Kabupaten Bantul dan hilangnya gairah bertani masyarakat. Hal ini secara umum nampak dari tingginya angka konversi sawah ke non sawah yang mencapai angka 187.720 ha per tahun (secara nasional)<sup>2</sup> dan 712,496 ha pertahun untuk

---

<sup>2</sup> Kementerian Pertanian, *Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014*, Kementerian Pertanian, hal 21. Secara nasional, luas baku lahan sawah mengalami penyusutan dari 8,3 juta ha pada tahun 1990 menjadi 7,8 juta ha pada tahun 2005 (Wahyunto, 2009).



Bantul.<sup>3</sup>

Melihat kondisi yang demikian, sejak tahun 2002 Pemerintah Bantul mengeluarkan kebijakan pembelian produk pertanian agar petani tidak terus menerus menderita kerugian. Pemkab Bantul bersedia membeli hasil pertanian melebihi harga pasar dengan tujuan untuk melindungi petani dari kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin melihat:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan sosial Pemkab Bantul untuk pembelian hasil panen?
2. Apakah kendala yang dihadapi pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan tersebut?
3. Seberapa besar pengaruh kebijakan tersebut terhadap produksi pertanian dan kesejahteraan petani di Bantul?

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan dan dampak kebijakan pengamanan harga pasca panen yang dilakukan Pemkab Bantul. Selain itu juga ingin melihat faktor penghambat dan akibat kebijakan tersebut bagi keuangan daerah. Adapun secara teoritik tulisan ini bermanfaat untuk mempublikasikan kepada khalayak umum tentang dampak positif kebijakan pasca panen di Bantul. Dengan demikian pemerintah di daerah lain juga bisa mengikuti program kebijakan yang telah dibuat Pemkab Bantul. Bagaimanapun sektor agraris merupakan penopang keamanan dan kedaulatan negara. Kesimpulan dalam penelitian ini juga meyakinkan dan menyarankan Pemkab Bantul untuk melanjutkan program, meskipun terjadi suksesi kepemimpinan yang berganti-ganti.

## **C. Tinjauan Pustaka**

Terdapat dua penelitian yang mengulas program

---

<sup>3</sup> Konversi lahan sawah menjadi bangunan dan tanaman tahunan dari tahun 1996 sampai 2006 di Bantul sekitar 40,10% (Dja'far Siddieq, dkk, 2010). Di Yogyakarta selama 18 tahun (1981-1998) terjadi konversi lahan pertanian ke non-pertanian sebesar 20.000 ha atau 823 ha pertahun (Irawan dan Friyatno, 2002). Menurut Sekda Bantul konversi lahan hanya 5 ha pertahun, baca 108CSR.com, *2.000 Hektare Lahan Pertanian di Bantul Boleh Dialih Fungsikan* 18 Oktober 2012 dan Solopos, *Lahan Susut, Bantul Terancam Kurang Pangan*, 22 Oktober 2010.

pengamanan harga pasca panen di Bantul, yaitu penelitian Tarcicius Harjuna Sigit Nugraha (2005) dan Siti Syamsiyar (2007). Tulisan yang kedua mengulas tentang bagaimana pelaksanaan program, sedangkan tulisan pertama mengulas tentang evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Keduatulisan ini menyimpulkan bahwa program pembelian panen petani dirasakan besar manfaatnya bagi para petani. Tarcicius Harjuna Sigit Nugraha (2005) menyimpulkan bahwa mayoritas petani di Bantul, yaitu 98,86 % puas dengan kebijakan pembelian hasil pertanian. Para petani di Bantul mulai merasakan rasa tenteram terbebas dari rasa takut akibat harga jual yang tidak stabil dan merugi ketika panen raya tiba. Meskipun demikian Tarcicius Harjuna Sigit Nugraha (2005) juga memberikan beberapa kritik terhadap kebijakan tersebut, yaitu tersentralnya program pembelian hasil panen menyebabkan petani harus menanggung biaya untuk mengangkut produksi hasil pertanian dan mereka juga harus antri cukup panjang.

Selain dua penelitian yang punya kaitan langsung dengan tulisan ini, terdapat tulisan Pajar Hatma Indra Jaya (2003) yang menyoroti perilaku "emoh-nya" anak petani untuk melanjutkan usaha di sektor pertanian. Perilaku tersebut muncul karena mereka menyadari bahwa menjadi petani tidak akan pernah membuat mereka sejahtera karena pemerintah selalu membuat kebijakan yang selalu menstabilkan harga. Ketika harga beras naik dan petani baru akan menikmatinya, pemerintah buru-buru impor beras. Dengan demikian pemerintah tidak akan rela jika harga beras menjadi tinggi, menjadi petani hanya akan menjadi tumbal pembangunan.

Tulisan ini mencoba mengungkap sisi-sisi lain dari kebijakan sosial tersebut, di mana ada kemungkinan celah untuk dikembangkan menjadi program pemberdayaan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat. Bahwa kebijakan tersebut harus terus dilakukan dengan pola yang lebih terstruktur dan berkreasi agar sama-sama untung. Sebuah program pemberdayaan akan berjalan secara *sustainable* jika obyek sasaran mendapat untung dan pelaku pemberdayaan juga mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut.

## D. Kerangka Teori

Petani dapat dibedakan menjadi *peasant* dan *farmer*. *Peasant* secara sederhana diartikan sebagai petani kecil (petani tradisional) yang usahanya dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan *farmer* dapat diartikan sebagai petani dengan lahan yang luas dan usaha pertaniannya dijual untuk bisnis (Eric Wolf, 1983: 2). Petani di Indonesia sebagian besar bertipologi sebagai *peasant* yang mendahulukan keharmonisan, pertimbangan moral, dan solidaritas daripada pertimbangan nalar ekonomi.

Menurut James C Scott (1981; 2000) ketika petani (*peasant*) mendapatkan ketidakadilan, mereka tidak akan melakukan perlawanan secara terbuka dan terang-terangan lewat pengorganisasian masa (kolektif), namun melakukan resistensi. Resistensi merupakan strategi perlawanan dengan maksud untuk mempertahankan diri dengan cara-cara lunak demi kelangsungan hidupnya. Perlawanan dengan metode ini kadang tidak dianggap sebagai bentuk perlawanan karena tindakannya tidak mengancam pemilik kuasa. Bentuk resistensi antara lain, tidak ikut dalam gotong royong, berbohong, ngemplang, sabotase. Menurut Scott bentuk perlawanan yang tidak frontal-langsung tersebut terjadi karena moralitas petani yang lebih mementingkan keselarasan (“keselamatan”) dibanding konflik.

Teori Scott mendapat kritik dari Samuel Popkin (1979).<sup>4</sup> Popkin berpendapat bahwa tindakan petani terjadi tidak semata-mata hanya karena moralitas tinggi petani, namun dilakukan karena pertimbangan rasional dalam memperkirakan kemampuan dan untung rugi dari bentuk perlawanan yang harus ia pilih. Tindakan petani tidak semata-mata hanya didorong nilai-nilai moral, namun juga memperhitungkan untung rugi. Resistensi lahir dari kesadaran

<sup>4</sup> Perbedaan interpretasi antara James C Scott dan Popkin nampak ketika menjelaskan kasus, mengapa petani lebih suka mengambil tenaga kerjanya dari masyarakat sekitar rumah daripada orang luar yang lebih terampil? Scott menjelaskan tindakan tersebut dengan konsep moralitas tinggi petani, yaitu petani mempunyai kepedulian sosial yang tinggi untuk berbagi dengan tetangga, sedangkan menurut interpretasi Popkin hal itu terjadi bukan atas pertimbangan moral, namun lebih pertimbangan rasional (untung rugi). Dengan mempekerjakan orang sekitar maka ia lebih bisa mengontrol pekerjaannya dan dapat melanggengkan relasi kuasa dengan tetangganya. Lihat Hayami dan Kikuchi (1981) dalam Sudarmawan Juwono, *Teori Tindakan Rasional Dan Moral* dan Rustinsyah (2011).

untuk memilih tindakan yang terbaik. Ketika petani menghadapi situasi krisis karena mereka selalu dimarginalkan lewat kebijakan impor maka ia akan mengambil ancang-ancang untuk beralih ke pekerjaan lain karena cara itu lebih menguntungkan daripada protes kepada penguasa dengan jumlah masa yang banyak.<sup>5</sup>

Agar petani tidak beralih pekerjaan maka ia harus merasakan manfaat dari pilihan pekerjaannya, untuk itu negara harus hadir membantu para petani. Merujuk UU Kesejahteraan Sosial Nomor 11 tahun 2009, terdapat 4 cara intervensi sosial agar masyarakat merasakan kehidupan yang adil dan sejahtera. Intervensi tersebut adalah rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Dari empat macam intervensi tersebut, negara dapat memilih perlindungan sosial<sup>6</sup> dengan memberikan subsidi demi terjaganya kedaulatan pangan. Namun perlu dicatat, pemberian subsidi yang tidak tepat terkadang melahirkan efek negatif berupa ketergantungan masyarakat terhadap negara.

## E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian evaluasi yang bermaksud memberi masukan guna pengembangan suatu kebijakan pemerintah (Etta Mamang Sangadji, 2010: 19). Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bantul, secara lebih khusus kelompok tani yang pernah mendapat manfaat dari program pembelian pasca panen. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli 2012 sampai Oktober 2012 dengan metode pengumpulan data berupa observasi (pengamatan), *interview* (wawancara),

---

<sup>5</sup> Lihat Oetami Dewi, Resistensi Petani: Suatu Tinjauan Teoritis, Jurnal Informasi, Vol 12, No 2, Tahun 2007, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2007, Rustinsyah, *Hubungan Patron-Klien di Kalangan Petani Desa Kebonrejo*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Volume 24, Nomor 2, 2011, Unair, Surabaya, Samuel Popkin. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press, 1979.

<sup>6</sup> Menurut UU Kesejahteraan Sosial nomor 11 tahun 2009, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan kepada semua orang yang mengalami keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

dan studi dokumentasi.

Observasi digunakan untuk mengamati strategi petani ketika menghadapi penurunan harga, sedangkan dokumentasi dicari dari data pembelian hasil pertanian yang pernah dilakukan Pemkab Bantul. Wawancara dilakukan kepada 1). Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Bantul. Informasi yang dicari antara lain sejarah dan mekanisme pelaksanaan program. 2). Masyarakat penerima manfaat. Informasi yang dicari adalah cerita tentang manfaat dan kekurangan yang dirasakan dengan adanya kebijakan tersebut.

## **F. Munculnya Ide: “Suara Rakyat = Suara Tuhan”**

Sejak 1998 Indonesia memasuki orde reformasi, dalam orde ini demokrasi menjadi sistem yang diagungkan, “suara rakyat adalah suara Tuhan”. Pemerintah daerah mendapat kewenangan untuk mengatur daerahnya dengan sistem otonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah dapat membuat kebijakan yang original untuk mensejahterakan atau memenuhi keinginan masyarakat. Sistem tersebut menuntut kepala daerah responsif dengan keluhan masyarakat. Kepala daerah harus membuka diri untuk menampung aspirasi. Kepala daerah yang mau “tilik” warganya menjadi idola masyarakat. Pada periode pertama reformasi, Bantul dipimpin oleh Drs. H.M. Idham Samawi. Beliau seringkali terjun langsung dan *sharing* bersama masyarakat.

Tahun 2001, Bupati Bantul mendapatkan keluhan dari petani bahwa harga beras cukup rendah, tidak sebanding dengan harga pupuk. Keluhan yang bertubi-tubi dari “*wong bantul*” ini direspon baik oleh bupati dengan munculnya Keputusan Bupati Bantul Nomor 413 Tahun 2001 tertanggal 1 Oktober 2001 terkait kebijakan pembelian gabah.<sup>7</sup>

Kegiatan pembelian gabah mulai dilakukan pada tahun 2002 dan ditanggapi dengan baik oleh para petani, para petani sangat senang dengan kebijakan ini. Keluhan yang sama dengan masalah yang serupa juga muncul dari petani bawang merah dan cabai. Harga kedua komoditas tersebut tidak mudah diprediksi. Harga tidak hanya ditentukan oleh penawaran dan permintaan, namun terasa ada permainan pengusaha-pengusaha besar. Harga cabai untuk setiap satu

<sup>7</sup> Wawancara dengan bendahara Tim Pasca Panen, Bapak Subari, pada tanggal 28 September 2012.

kilogram terkadang bisa mencapai Rp. 100.000,-, namun secara tiba-tiba bisa turun drastis menjadi Rp. 2.000,- Oleh karena keluhan itu maka muncullah keputusan Bupati Bantul Nomor 12A Tahun 2003 pada tanggal 31 Januari 2003.

Keputusan baru tersebut memperluas cakupan kebijakan pembelian produk pertanian menjadi tujuh komoditas penting yang dihasilkan petani Bantul. Tidak hanya beras yang harga jualnya dilindungi, namun juga padi, jagung, kedelai, kacang tanah, bawang merah, cabai merah, dan tembakau. Namun hanya padi, bawang merah, jagung, dan cabai yang sering mendapat alokasi karena harganya paling sering mengalami fluktuasi, sedangkan tiga komoditas yang lain harganya relatif masih wajar.

Kebijakan pembelian produk pertanian ketika harganya turun tersebut adalah kebijakan original dari Bantul.<sup>8</sup> Kebijakan tersebut muncul karena dalam era demokrasi bupati mempunyai ruang untuk membuat kebijakan yang berbeda. Di tingkat pusat sebenarnya ada Bulog (Badan Urusan Logistik), namun dalam kinerjanya lebih sering menurunkan harga beras daripada menaikkan. Lebih sering mendukung kebijakan impor beras daripada ekspor.

Kebijakan pembelian harga beras merupakan salah satu kebijakan subsidi harga dalam konsep *social welfare*. Mungkin orang yang mempunyai ideologi kapitalis menganggap kebijakan tersebut irasional, namun kebijakan tersebut sesuai dengan amanat negara untuk melindungi rakyatnya. Campur tangan negara untuk melindungi rakyatnya sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Pemkab Bantul, Amerika yang dianggap sebagai penganut Ideologi kapitalisme juga melakukannya.

Akibat dari praktek kebijakan melindungi petani membuat masyarakat Bantul menyayangi Drs. H.M. Idham Samawi dengan memilihnya pada periode kedua. Bahkan jika tidak dibatasi masyarakat ingin memilihnya untuk yang ketiga kalinya. Karena kebijakan yang populis pro rakyat itu pula yang mengantar Hj. Idham Samawi menggantikan posisi

---

<sup>8</sup> Ketika memantau turunnya harga bawang merah di Brebes, menteri pertanian mengatakan pemda harus tanggap dengan persoalan petani sehingga tidak perlu intervensi pemerintah pusat untuk menangani persoalan tersebut. Menurutny Brebes dapat meniru apa yang telah dilakukan Pemkab Bantul dengan menyiapkan dana pembelian komoditas pertanian jika harganya turun. [www.panturanews.com](http://www.panturanews.com), *Menpan: Saya Beli Bawang Hanya Menyindir Pemda*, 30 Juli 2011.

suaminya.

## G. Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan pasca panen menggunakan dua mekanisme, 1). Manajemen keluhan, 2). Manajemen jempot bola. Metode pertama dilakukan ketika petani merasakan turunnya harga komoditas pertanian dan melaporkannya ke petugas baik tingkat kecamatan atau dinas di kabupaten. Metode kedua dilakukan secara langsung oleh petugas melalui pemantauan harga ketika mengetahui bahwa harga pertanian turun melampaui harga standar. Bila harga pasar anjlok di bawah harga dasar saat panen raya tiba, tim pasca panen langsung terjun ke masyarakat.

Dalam mekanisme kerja model manajemen keluhan, ketika petani merasakan rendahnya produk pertanian mereka dapat menyampaikan informasi ke petugas pertanian di kecamatan atau langsung ke Dinas Pertanian Kabupaten Bantul. Jika laporan disampaikan di kecamatan maka pihak perwakilan dinas pertanian kemudian mengadakan keluhan dengan mengirimkan surat resmi ke kabupaten mengenai kondisi yang terjadi. Atas informasi yang telah diterima tersebut petugas pertanian mencatat asal kelompok tani yang melapor dan segera meneruskannya ke petugas terkait di kabupaten. Selanjutnya petugas di kabupaten segera melakukan koordinasi, memeriksa harga pasar, dan meminta petani untuk mengumpulkan hasil pertaniannya di satu lokasi yang dekat dengan area kelompok tani itu berasal. Selanjutnya petugas langsung melakukan pembelian sesuai harga dasar yang ditetapkan. Proses pembayaran dilakukan secara langsung setelah warga mengumpulkan hasil pertaniannya. Bila harga komoditas kembali normal sesuai harga dasar, operasi pasar dihentikan dan petani dipersilakan menjualnya ke pasar.

Jika laporan langsung disampaikan ke dinas, prosesnya tidak jauh berbeda karena dinas akan menghubungi petugas perwakilan di tingkat kecamatan. Atas informasi yang telah diterima tersebut, petugas pertanian langsung mendata dan mencatat asal kelompok tani yang melapor dan segera meneruskannya ke dinas pertanian (petugas terkait di kabupaten). Prosedur selanjutnya sama dengan mekanisme ketika keluhan disampaikan ke kecamatan.

*Multiple efek:* Biasanya terjadi ketika pedagang mengetahui

bahwa pemerintah akan membeli hasil panen dari para petani, mereka pun ikut serta membeli hasil panen dengan harga sesuai dengan ketetapan pemerintah. Hal ini cukup berpengaruh pada kembali normalnya harga pertanian.

Dana pembelian dari kegiatan pasca panen ini diperoleh dari dana APBD tahun 2001 sebesar 1,5 milyar dan tahun 2002 sebesar 2 milyar. Dana ini digunakan seefisien mungkin agar dapat bertahan lama. Dana tersebut digunakan hanya bila harga komoditas pertanian berada di bawah harga dasar yang telah ditetapkan. Jika harga produk pertanian lebih tinggi dari harga dasar maka petani dipersilahkan untuk menjualnya ke pasar. Dengan demikian pemerintah tidak harus selalu mengeluarkan uangnya, seperti pada tahun 2009 pemerintah tidak melakukan pembelian.

Dana pemerintah tersebut pernah bertambah menjadi 3.757.029.621 pada tahun 2003 karena bunga deposito bank, namun karena tidak diperbolehkan dimasukkan ke bank maka pada tahun berikutnya tidak ada pemasukkan bunga.<sup>9</sup> Saat ini dana tersebut masih tersisa sekitar 1,6 milyar. Adapun anggaran terbesar yang dikeluarkan tim pasca panen sejak 5 tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 301.062.000 pada tahun 2010 untuk pembelian gabah kering. Lihat tabel I di bawah ini:

Tabel I  
Sejarah Program Pembelian Hasil Pertanian

No	Tahun	Kebijakan	Anggaran
1.	2008	Jagung, Gabah dan Beras	64.534.000
2.	2009	Tidak terjadi pembelian	-
3.	2010	Gabah Kering	301.062.000
4.	2011	Gabah Kering	179.322.630
5.	2012	Gabah Kering	68.067.900

Sumber: Data primer Dinas Pertanian Bantul

Dari setiap transaksi pemerintah berani memberikan subsidi sampai Rp 800,- perkilogram. Sebagai contoh pada tahun 2003 ketika harga cabai di pasaran hanya Rp. 700,- sampai Rp. 1.200,- pemerintah berani membeli antara Rp. 1.500,- sampai Rp. 1.700,-

<sup>9</sup>Namun untuk keamanan, saat ini dana tersebut disimpan di bank kembali. Wawancara dengan St petugas Dinas Pertanian Pemkab Bantul pada tanggal 25 Oktober 2012.



Selain untuk pembelian gabah (pasca panen), dana yang banyak dikeluarkan dan sampai saat ini tidak kembali terjadi dalam kasus peminjaman dana kepada petani bawang merah ketika mereka tidak panen akibat banjir. Genangan air yang cukup lama membuat tanaman bawang merah busuk, padahal belum layak untuk dipanen. Jika dipanen harganya juga murah akibatnya terjadi gagal panen.

Situasi tersebut membuat petani tidak punya bibit untuk ditanam pada musim berikutnya. Mendapat keluhan petani, Bupati Bantul secara sigap memerintahkan aparat untuk membantu mengatasi dengan memunculkan program kredit untuk pembelian bibit bawang merah. Sesuai perjanjian, pinjaman tersebut dikembalikan ketika panen tiba. Celakanya, meski ada surat perjanjian resmi bahwa mereka harus mengembalikan pinjaman ketika panen tiba, namun mereka tidakpunyaniatbaikuntukmengembalikanpinjaman. Pemkab telah berusaha jemput bola dengan menyebar pegawainya untuk menagih dari rumah ke rumah, namun hasilnya belum maksimal dibanding dengan tenaga tagih yang dikeluarkan Pemkab. Meskipun beberapa petani mengangsur pinjaman, namun lebih banyak lagi petani yang mengatakan tidak mempunyai uang. Ketidakmampuan negara menghadirkan *punishment* sudah nampak dari program Kredit Usaha Tani (KUT) tahun 2000, di mana lebih dari 82,3% kredit petani tidak kembali dan negara membiarkannya dengan alasan program tersebut adalah katub pengaman masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi 1998. Efek dari tindakan tersebut adalah timbulnya mentalitas “ngemplang” pinjaman negara (Ernany, 2002: 2).

Di sisi lain, di era demokrasi langsung, petani yang jumlahnya banyak punya kekuatan yang menentukan bagi menang kalahnya kompetisi dalam pemilu. Berdasarkan logika tersebut tidak mungkin terjadi penarikan kredit secara paksa kepada petani. Jika itu dilakukan dukungan petani kepada penguasa dapat dicabut, apalagi melindungi masyarakat merupakan kewajiban negara.

## **H. Dampak Kebijakan: Dari Untung Rugi Menjadi Untung-Untung**

Kebijakan pembelian komoditas pertanian ketika harga turun memberikan dampak positif bagi para petani, mereka

tidak akan merasa takut menghadapi kerugian saat panen raya karena pemerintah siap membeli produk mereka di atas harga pasar ketika harga jatuh. Berdasarkan studi Tarcicius Harjuna Sigit Nugraha (2005) disimpulkan bahwa mayoritas petani di Bantul, yaitu 98,86 % puas dengan kebijakan pembelian hasil pertanian. Temuan tersebut sesuai pendapat Bapak Mardiyo, Ketua Gapoktan Gemah Ripah Desa Pendowoharjo, yang mengatakan kebijakan tersebut sangat baik karena membantu dalam mencegah terjadinya kerugian petani. Dengan demikian kebijakan pembelian komoditas pertanian pasca panen ini sudah sangat bagus karena membantu mengurangi kerugian masyarakat saat terjadinya panen raya.

Dilihat dari pemerintah, karena proses pembelian dilakukan hanya ketika harga barang jatuh di bawah biaya produksi atau tidak sampai menutupi modal awal maka pemerintah selalu “merugi”. Namun inilah konsekuensi yang harus dilakukan pemerintah sebagai tugasnya melindungi masyarakat. Meskipun akan lebih baik lagi jika pemerintah tidak merugi dalam proses intervensi ini.

Namun demikian meruginya pemerintah bukan satu kejadian yang harus disesali. Jika petani dibiarkan menanggung sendiri kerugiannya akan menimbulkan dampak psikologi berupa sikap “emoh” bertani, akibatnya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara.

Menurut teori *punish* dan *reward* dan juga konsep petani rasional, jika seorang mendapat satu ketidakenakan dari satu kejadian maka dia tidak akan mengulangi perilakunya tersebut. Oleh karena itu kekhawatiran yang lebih besar dari dampak sengsaranya petani adalah terjadinya konversi lahan dan pekerjaan ke non-pertanian yang saat ini telah terasa. Hampir semua anak petani tidak ingin bekerja di sektor pertanian dan hampir semua petani tidak mencita-citakan anaknya menjadi petani. Dengan demikian dalam jangka panjang perlindungan kepada petani ini tidak merugikan negara terutama terkait dengan ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Apalagi kerugian ekonomi negara juga tidak terlalu besar untuk mendukung kebijakan ini.

Dalam kurun waktu mulai tahun 2002 sampai 2012 atau 10 tahun Pemkab Bantul mengeluarkan 1,9 milyar. Hal ini berarti dalam setahun rata-rata mengeluarkan sekitar 190 juta

atau dalam sebulan mengeluarkan 15,8 juta. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah anggaran studi banding anggota DPR pada bulan september tahun 2012 yang menghabiskan anggaran Rp 1,3 miliar.<sup>10</sup> Meskipun demikian perlu ada terobosan agar kebijakan ini tidak merugikan pemerintah, namun malah menguntungkan.

Saat pemerintah membeli hasil panen petani dengan harga di atas harga pasar di Bantul, agar tidak merugi pemerintah dapat menjual kembali ke daerah yang harga cabainya lebih tinggi. Seperti contoh pembelian cabai, pemerintah menjualnya dalam kondisi masih basah atau kadang sudah dikeringkan yang selanjutnya dititipkan lewat pedagang besar ke pasar induk Jakarta. Jika hasil pertaniannya berupa gabah, lebih mudah lagi, tim pasca panen dapat menyimpannya terlebih dahulu dan menjual kembali pada saat harga gabah naik. Jadi antara pemerintah dan petani saling diuntungkan sehingga sirkulasi dana yang dimiliki pemerintah berjalan normal. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antar daerah ketika di satu daerah harga komoditas tinggi, namun di daerah lain rendah bisa dijalin kerja sama pemindahan komoditas.

## **I. Kesimpulan dan Saran**

Kebijakan pasca panen merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk mengurangi kerugian petani akibat rendahnya harga jual produk pertanian. Walaupun dalam kebijakan pasca panen ini pemerintah mengalami kerugian, namun hal itu merupakan bentuk solidaritas pemerintah terhadap nasib petani. Dengan perlindungan ini masyarakat akan tetap semangat untuk terus bekerja di sektor pertanian. Apa yang terjadi dengan Indonesia jika petani “emoh” menanam padi lagi, Indonesia akan tergantung dengan bangsa lain. Intervensi pemerintah semacam ini tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, Amerika pun sebagai negara penganut kapitalisme juga melakukan hal ini.

Dalam proses pemberdayaan berlaku prinsip sama-sama untung, yang diberdayakan dan yang memberdayakan tidak boleh ada yang rugi. Kondisi sama-sama untung akan menjamin keberlanjutan program ini. Untuk itu diperlukan strategi baru untuk mewujudkan situasi yang sama-sama

---

<sup>10</sup> <http://situs-beritaterbaru.blogspot.com/2012/09/cuma-soal-logo-pmi-22-anggota-dpr-studi.html>, diakses pada 04 oktober 2012.

untung. Berdasarkan hasil penelitian ini, hal yang bisa dilakukan pemerintah agar tidak terus menerus menanggung kerugian adalah:

1. Tindakan preventif, yaitu tindakan untuk mencegah agar petani tidak menemui harga rendah ketika panen raya tiba. Hal ini dilakukan dengan cara penguatan kemampuan petani untuk dapat membaca kalender musim dan perulangan fluktuasi harga pasar.
2. Pemindahan, yaitu peran pemerintah sebagai broker/fasilitator. Jika harga komoditas pertanian di Bantul memang turun dan petani sedang panen maka pemerintah dapat membukakan akses ke pasar yang lebih luas sehingga harga jual tetap tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengirim hasil pertanian ke daerah lain, ke luar negeri, atau bekerja sama dengan industri yang membutuhkan.
3. Pengemasan produk untuk dijual dalam bentuk barang jadi atau kemasan yang siap konsumsi. Misalnya mengolah cabai merah menjadi sambal kemasan. Hal ini bisa dilakukan jika industri cabai yang ada tidak mau menyerap produk pertanian Bantul.
4. Penyimpanan. Pemerintah membeli dan menyimpan barang untuk dijual kembali ketika harga telah normal.

# DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sunartiningsih, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Aditya Media. Yogyakarta, 2004.
- Dja'far Siddieq, dkk, *Pemanfaatan Citra Landsat TM Pada Pemetaan Dampak Konversi Lahan Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Di Propinsi D.I. Yogyakarta Dan Bali*, UGM dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Yogyakarta, 2010.
- Eric R Wolf, *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Ernany dkk, *Efektivitas Program Kredit Mikro dan Kecil: Kasus KUT, P2E-LIPI*, Jakarta 2002.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Irawan dan Friyatno, *Dampak Konversi Lahan Sawah di Jawa Terhadap Produksi Beras dan Pengendaliannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor, Soca Vol. 2, No.2, 2002.
- James C Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES, Jakarta, 1981.
- James C. Scott, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*, Yayasan Obor, Jakarta, 2000.
- Kementrian Pertanian, *Rancangan Rencana Strategis Kementrian Pertanian Tahun 2010-2014*, Kementrian Pertanian, hal 21. Di unggah 29 Januari 2013 di <http://setjen.deptan.go.id/admin/download/rancangan%20renstra%20deptan%202010-2014%20lengkap.pdf>.
- Oetami Dewi, *Resistensi Petani: Suatu Tinjauan Teoritis*, *Jurnal Informasi Vol 12, No 2, Tahun 2007*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2007.

- Pajar Hatma Indra Jaya, *Transformasi Tenaga Kerja Pedesaan: Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Perubahan Mata Pencarian Penduduk Desa Antar Generasi, dari Sektor Agraris Ke Sektor Non Agraris Di Desa Mulyodadi, Kec Banglilipuro, Kab. Bantul, UNS, Surakarta, 2003.*
- Rustinsyah, Hubungan Patron-Klien di Kalangan Petani Desa Kebonrejo, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Volume 24, Nomor 2, 2011, Unair- Surabaya, 2011.*
- Samuel Popkin. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam.* Berkeley: University of California Press, 1979.
- Sigit Nugraha, *Evaluasi Program Pengamanan Harga Pasca Panen Hasil Pertanian di Kabupaten Bantul, Tesis Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2005.*
- SitiSyamsiyar, *Upaya Pemberdayaan Petani Bawang Merah Melalui Kebijakan Harga di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode 2003-2005), Tesis Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2007.*
- Sudarmawan Juwono, *Teori Tindakan Rasional dan Moral,* sukawayang.wordpress.com, diakses 31 Januari 2013.
- Wahyunto, Lahan Sawah di Indonesia sebagai Pendukung Ketahanan Pangan Nasional, *Warta Informatika Pertanian, Volume 18 No. 2, 2009, Badan Litbang Pertanian, Jakarta, 2009.*

**Internet:**

- <http://108CSR.com>, 2.000 Hektare Lahan Pertanian di Bantul Boleh Dialih Fungsikan, 18 Oktober 2012, <http://www.108csr.com/default/news/2012/10/18/21194/2-000-Hektare-Lahan-Pertanian-di-Bantul-Boleh-Dialih-Fungsikan>.
- <http://bisnisukm.com/potensi-bisnis-budidaya-bawang-merah.html> diakses pada 07 Agustus 2012.
- <http://www.bantulonline.com/2011/07/areal-pertanian-bantul-capai-15305.html>.
- <http://situs-beritaterbaru.blogspot.com/2012/09/cuma-soal-logo-pmi-22-anggota-dpr-studi.html>, diakses pada 04 oktober 2012.

Solopos, *Lahan Susut, Bantul Terancam Kurang Pangan*, <http://www.solopos.com/2010/10/22/lahan-susut-bantul-terancam-kurang-pangan-142704>, diunduh tanggal 29 Januari 2013.

[www.panturanews.com](http://www.panturanews.com), *Menpan: Saya Beli Bawang Hanya Menyindir Pemda*, 30 Juli 2011.





# BABONISASI SEBAGAI PROGRAM INOVATIF PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Muhammad Nur Kholis dan Triharyono<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Babonisasi merupakan program inovatif yang merangsang semangat kemandirian masyarakat. Program ini sesuai dengan salah satu dasar filosofis pengembangan masyarakat, yaitu "membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri". Masyarakat merespon baik kebijakan babonisasi, bahkan program ini mendorong masyarakat untuk berdaya dan berinisiatif dengan cara berkreasi untuk mencipta program turunan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti melahirkan kelompok sadar gizi dan arisan ayam ibu-ibu dasa wisma.*

*Kata Kunci: Mandiri, Babonisasi, Melahirkan Inisiatif Pemberdayaan.*

---

## **A. Latar Belakang**

Pengembangan masyarakat (*community development*) merupakan sejarah yang panjang dalam praktek pekerjaan sosial.<sup>2</sup> Menurut Harry Hikmat, dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, wacana pengembangan masyarakat mulai muncul ke permukaan sekitar dekade 1970-an dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an, bahkan sampai sekarang. Kemunculan wacana pengembangan masyarakat ini hampir bersamaan

<sup>1</sup> Muhammad Nur Kholis merupakan mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, F. Dakwah, UIN Sunan Kalijaga. Tri Haryono S.Sos. I merupakan alumnus di jurusan yang sama dan saat ini menjadi aktivis NGO serta pengurus Laboratorium Pengembangan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

<sup>2</sup> Edi Suharto, 'Metodologi Pengembangan Masyarakat', Jurnal *Comdev* 1, 2005, hal 3.

dengan mulculnya aliran-aliran seperti fenomenologi dan personalisme dalam wacana pembangunan, yang kemudian disusul oleh masuknya gelombang pemikiran neo-marxisme, freudisme, strukturalisme, dan sosiologis kritis dari sekolah Frankfurt. Dalam konteks ini muncul pula konsep-konsep seperti elit, kekuasaan, anti-kemapanan, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi, pembebasan, *civil society*.<sup>3</sup>

Sebagai sebuah wacana dalam ilmu sosial pada umumnya dan studi pembangunan pada khususnya, pengembangan masyarakat mempunyai makna yang penting. Hal ini didasarkan pada perdebatan kontemporer mengenai proses pembangunansejak dipertanyakannya perspektif modernisasi dalam pembangunan dianggap sebagai perspektif yang sarat dengan bias kepentingan negara maju. Dalam konteks ini pengembangan masyarakat menjadi semacam spirit atas sebuah paradigma pembangunan yang tidak lagi *derived*, yang direncanakan dari atas atau bahkan mengikuti pola "Barat", tetapi sebagai sebuah pembangunan yang bercorak *people centered*. Selain itu, prinsip *botton-up* menjadi sebuah kata yang sangat menjanjikan atas dasar kegagalan beberapa negara dalam mensejahterakan rakyatnya.<sup>4</sup>

Dasar filosofis pengembangan masyarakat adalah *help people to the help himself* (membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri). Dengan demikian, paradigma masyarakat yang ingin dibangun adalah masyarakat yang senantiasa berada dalam proses menjadi, *becoming being*, bukan *being in statis state*.<sup>5</sup> Dengan kata lain, visi pengembangan masyarakat sebagai terjemahan dari dasar filosofisnya adalah membantu proses pemberdayaan masyarakat agar mereka menjadi komunitas yang mandiri.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam sebuah kegiatan pengembangan masyarakat, terlebih lagi dalam era otonomi daerah sekarang ini partisipasi publik/masyarakat menjadi elemen yang penting dalam demokrasi. Dalam konteks ini, partisipasi publik tidak hanya membawa implikasi pada tatanan supra

---

<sup>3</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2001), hal 1.

<sup>4</sup> A. Halim, "Paradigma Dakwah Pengembangan Masyarakat", dalam Moh Ali Aziz, dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2005, hal 3.

<sup>5</sup> *Ibid.*

struktur (mekanisasi manajemen pemerintahan) tetapi juga pada tatanan infrastruktur (kondisi masyarakat). Dalam kaitan dengan ini beberapa pemerintah daerah/kota gencar mengembangkan program inovatif untuk mendongkrak percepatan pembangunan didaerahnya dengan melibatkan masyarakat sebagai subyek dalam program tersebut. Salah satu dari sekaian kabupaten yang mengembangkan program inovatif dalam kebijakan sosial dalam pendidikan adalah Kabupaten Bantul dengan program Babonisasi.

Sepintas, tentu akan mengundang pertanyaan, mengapa program babonisasi ini diangkat dalam penelitian ini, padahal program ini sebenarnya dalam kerangka pemenuhan dan peningkatan gizi dan anak. Tetapi ketika melihat gaung yang ditimbulkan dari adanya program ini yang bukan saja menjadi bahan perbincangan di lingkungan masyarakat Bantul, melainkan juga menyebar ke daerah-daerah sekitarnya, menjadi perbincangan pada tingkat nasional bahkan mendapatkan pujian dari organisasi internasional setingkat WHO, program ini cukup menarik dan sangat layak untuk ditelaah lebih lanjut.

Di samping itu juga, yang menjadi menarik dari program ini adalah manfaat dari program ini adalah tidak hanya untuk siswa, guru dan kepala sekolah, orangtua saja, namun juga untuk masyarakat yaitu dengan program babonisasi ini akan terjadi penambahan aktivitas perekonomian masyarakat dan diharapkan akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian dampak yang diterima dari kegiatan program ini sangat terasa bagi mereka, Siswa yang telah menerima ayam harus berusaha memelihara ayam tersebut dan bagi orangtua secara otomatis akan membimbing anaknya dalam memelihara ayam tersebut dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tulisan ini akan mengkaji, 1). Bagaimana program babonisasi bisa menjadi pendorong dalam peningkatan ekonomi warga? 2). Seberapa respon masyarakat terkait dengan program babonisasi tersebut.

## **B. Kajian Riset Sebelumnya**

Telah banyak berbagai penelitian berkaitan dengan program babonisasi ini, namun dalam penelitiannya masih

sebatas pengaruhnya terhadap prestasi belajar anak. Sebut saja Trismi Haryatiningsih dan Istijanah. Kedua peneliti tersebut; Trismi Haryatiningsih dengan penelitiannya yang berjudul "Dampak kegiatan program Babonisasi terhadap prestasi belajar siswa Sekolah Dasar di kabupaten Bantul yang mengambil lokasi penelitiannya di SD Negeri 1 Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul. Sedangkan Istijanah dengan judul *Pengelolaan program babonisasi dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar di SD 2 Iroyudan Kabupaten Bantul*. Kedua peneliti tersebut meneliti hanya sebatas pengelolaan program babonisasi yang dilaksanakan di sekolah dasar, dan dampak kegiatan program babonisasi terhadap prestasi belajar siswa.

Penelitian yang cukup komprehensif kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Yuningtyas Setyawati dengan judul *Babonisasi Sebagai Usaha Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menciptakan Kecukupan Gizi Keluarga (Studi Evaluasi Tentang Pelaksanaan Program Babonisasi Di Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Namun penelitian ini hanya sebatas untuk mengetahui akseptabilitas dan keberhasilan program "babonisasi" yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul, di mana dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program babonisasi dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Bantul pada umumnya dan masyarakat Srandakan pada khususnya. Kemanfaatan program babonisasi yang dirasakan oleh sebagian besar siswa penerima adalah terkait dengan pemenuhan gizi dan penambahan protein hewani. Pemberian bantuan ayam babon dari hasil penelitian ini telah tepat sasaran, karena sebagian besar (lebih dari 50,00 %) adalah berasal dari keluarga strata bawah. Oleh karena itu dengan kemampuan yang terbatas maka kelompok kemudian dapat memenuhi kebutuhannya karena mereka memperoleh bantuan ayam babon dan secara menyeluruh program babonisasi sudah mengarah pada upaya pemberdayaan masyarakat, karena dengan program tersebut masyarakat diarahkan untuk dapat berjiwa kewirausahaan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, secara keseluruhan belum ada yang membahas secara spesifik dan komprehensif tentang segi partisipasinya warga dalam pengembangan masyarakat melalui program

babonisasi dimaksud.

### C. Kerangka Teori

Pekerjaan sosial, menurut Edi Suharto, secara garis besar melibatkan penanganan pada dua tingkatan, yakni tingkat mikro (individu, keluarga, kelompok) dan tingkat makro (organisasi dan masyarakat). Dari dua tingkatan pekerjaan sosial tersebut, pengembangan masyarakat termasuk praktek pekerjaan sosial tingkat makro.<sup>6</sup> Dengan demikian, pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah satu metode pekerjaan sosial yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas hidup manusia melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada masyarakat serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.<sup>7</sup>

Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat memungkinkan pemberi dan penerima pelayanan terlibat secara bersama-sama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam hal ini pengembangan masyarakat meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat, mulai dari pelayanan prefentif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.<sup>8</sup>

Wacana tentang pengembangan masyarakat sebagaimana telah dijelaskan di atas pada dasarnya berakar dari arah kebijakan pembangunan nasional yang ditempuh pemerintah. Suatu realitas yang nampak jelas dalam proses pembangunan nasional di Indonesia selama ini ialah bahwa perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam upaya pembangunan selalu merefleksikan kebijakan politik yang digariskan dari atas oleh penguasa rezim. Kebijakan ini, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh orang-orang pemerintah tanpa mengundang partisipasi masyarakat, tak jarang justru lebih tertuju untuk kepentingan elit yang tengah berkuasa daripada untuk kepentingan rakyat banyak. Karena itu, pembangunan tampak lebih sebagai

<sup>6</sup> Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 113-114.

<sup>7</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 37.

<sup>8</sup> Edi Suharto, 'Metodologi Pengembangan Masyarakat', hal. 3.

proses politik, dan kemudian ekonomi, daripada sebagai suatu proses sosial budaya yang mencerminkan keberdayaan masyarakat warga, khususnya yang bermukim di daerah pedesaan dan yang sering dibiarkan tertinggal di belakang, tersingkir sampai ke pinggir.<sup>9</sup>

Kenyataan tersebut di atas berkembang lebih lanjut ketika pada akhir 1960-an Indonesia mengadopsi teori modernisasi, yakni ketika Orde Baru menggantikan rezim Orde Lama. Menurut M. Syafi'i Anwar, pilihan pemerintah Orde Baru memilih modernisasi sebagai titik tolak dan kerangka landasan pembangunan bangsa merupakan pilihan strategis yang memiliki dua implikasi politik. *Pertama*, pemerintah Orde Baru dengan demikian mempunyai basis "Ideologi" kuat yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak, dan karena itu akan menarik dukungan dan partisipasi politik. Selain itu juga akan menggeser ideologi politik yang bersifat primordial. *Kedua*, dukungan dan partisipasi politik masyarakat pada gilirannya akan mendukung kelangsungan pembangunan dan mengukuhkan posisi pemerintah Orde Baru.<sup>10</sup>

Akan tetapi, perkembangan yang direkayasa menurut teori modernisasi yang anti tradisi itu, yang meyakini keharusan perkembangan kemakmuran melalui industrialisasi sebagai bagian dari perkembangan alami yang unilinear dan satu arah di bidang sosial dan kultural, yang tidak jarang amat bernuansa kapitalistik, pada akhirnya, menurut Soetandyo Wignyosoebroto, hanya menimbulkan ketergantungan, baik pada situasi kehidupan internasional (ketergantungan kepada negara-negara industri) maupun pada situasi kehidupan nasional dan regional (ketergantungan golongan masyarakat lemah kepada golongan masyarakat yang kuat dan telah mapan).<sup>11</sup>

Selain itu, karena pembangunan menurut paradigma modernisasi lebih mengutamakan pertumbuhan daripada pemerataan, dan kecenderungan mengutamakan pertumbuhan dibanding pemerataan itu masih menjadi

---

<sup>9</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, 2005, Kata pengantar dalam Moh Ali Aziz, dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2005, hal. viii.

<sup>10</sup> Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Paramadina, Jakarta, 1995, hal 8.

<sup>11</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, 2005, Kata pengantar, hal viii-ix.

pilihan sampai sekarang, maka di satu sisi pembangunan memang berhasil membuahkan pertumbuhan yang tinggi. Tetapi di pihak lain kebijakan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan tersebut ternyata melahirkan kesenjangan-kesenjangan: kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan pembangunan daerah, perkotaan dan pedesaan, kesenjangan perkembangan sektor formal dan sektor informal, kesenjangan sektor tradisional dan sektor modern, dan sebagainya. Dari sinilah sesungguhnya berakar berbagai isu pembangunan ekonomi dan sosial yang kemudian melahirkan wacana pengembangan masyarakat.

Sejumlah pembangunan ekonomi dan sosial yang berakar dari pilihan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada "ideologi" modernisasi dimaksud adalah isu-isu kemiskinan, pekerja migran, komunitas marginal di perkotaan dan isu desa tertinggal. Mudiyo dkk. (2005) mencatat sebuah isu pembangunan ekonomi dan sosial meliputi masalah-masalah, selain yang sudah disebutkan di atas, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan buruh, kaum pemulung, usaha kecil, kekerasan seks pada perempuan, dan program transmigrasi.<sup>12</sup> Isu-isu lain yang dicatat oleh Edi Suharto (2005) adalah masalah perlakuan salah terhadap keluarga, pemberdayaan keluarga, tanggung jawab sosial perusahaan, konflik sosial, masyarakat multikultural, dan isu globalisasi.<sup>13</sup> Sementara itu, Carolina Nitimihardjo dan kawan-kawan mengagendakan sejumlah isu tematik pembangunan sosial, yang selain sudah disebutkan di atas, meliputi: isu perubahan sosial, isu pelayanan sosial anak usia dini, isu pemberdayaan masyarakat adat terpencil, isu integrasi sosial, dan isu partisipasi sosial.<sup>14</sup>

Semua isu pembangunan ekonomi dan sosial tersebut memerlukan penanganan secara profesional, terencana, dan terarah melalui aksi pengembangan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Mudiyo, dkk. *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta 2005.

<sup>13</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

<sup>14</sup> Carolina Nitimihardjo, dkk. *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsep dan Strategi*, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial, 2005.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang mengungkapkan fakta secara deskriptif. Sehingga data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.<sup>15</sup> Peneliti mendeskripsikan tentang program babonisasi sebagai program inovatif pemerintah Bantul dimana dampak dari kebijakan sosial tersebut mampu mendorong partisipasi warga dalam program tersebut yang akhirnya berdampak pada peningkatan ekonomi warga masyarakat. Adapun secara spesifik penelitian ini dilakukan di desa Wonokromo, kecamatan Pleret dan desa Panjangrejo kecamatan Pundong. Informan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah para orangtua murid SD yang dulu pernah menerima program babonisasi. Cara penarikan informan dilakukan secara random dan berusaha menemukan sebanyak mungkin dari orangtua siswa SD yang dulu menerima program program babonisasi tersebut.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan telaah dokumen. Telaah dokumentasi menjadi teknik pengumpulan yang penting selain wawancara karena dokumentasi yang didapat peneliti adalah dokumen resmi dari kantor dinas pendidikan Bantul. Untuk mendapatkan validitas data peneliti melakukan triangulasi.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan metode. Pengecekan data dilakukan sambil peneliti melakukan analisis. Pengecekan data dalam penelitian ini mempunyai kedudukan yang sama dengan reduksi data dan analisis.

#### **E. Rasionalisasi Program Banonisasi dalam Pengembangan Masyarakat**

Menurut dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul No. 914/95/2003 yang dimaksud Babonisasi adalah program unggulan untuk peningkatan gizi anak khususnya siswa sekolah dasar (SD) di kabupaten Bantul dengan cara memberikan ayam babon kepada tiap siswa masing-masing

---

<sup>15</sup> Matthew Miles B., dkk, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta, 1992, hal 15.

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal. 177,178.



3 ekor ayam untuk dipelihara, sehingga babon tersebut berkembang dan bertelur yang dapat dikonsumsi oleh siswa setiap hari.

Semula program babonisasi hanya ditujukan untuk siswa Sekolah Dasar (SD) untuk mencukup gizi dan protein anak di mana salah satu sumber gizi yang sangat diperlukan oleh anak didik untuk mendorong kecerdasan adalah protein hewani. Dengan demikian apabila anak didik khususnya siswa Sekolah Dasar (SD) dapat mengkonsumsi telur setiap hari, maka diharapkan akan bertambah stamina dan kecerdasan sehingga mampu berprestasi belajar secara baik. Adapun dasar pemikiran yang melandasi program ini adalah; peningkatan kualitas hidup akan berhasil bila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu perlu dipersiapkan sejak dini. Dalam mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk masa mendatang salah satu upayanya adalah melalui program babonisasi.

Selain tujuan utama untuk meningkatkan gizi siswa, program babonisasi ini juga dianggap dan diharapkan membawa fungsi lain yang positif, yaitu melatih siswa untuk memiliki disiplin dan tanggung jawab, dan melatih berperilaku wiraswasta. Sebagaimana dikatakan oleh Juremi Ketua Forum Komunikasi Dewan Sekolah Kecamatan Pajangan, "Sebab dengan babonisasi dapat meningkatkan gizi keluarga, mendidik anak bertanggungjawab dan melatih mandiri, menanamkan jiwa kewirausahaan kepada anak".<sup>17</sup>

Di samping manfaat yang diterima dari program ini untuk siswa, guru dan kepala sekolah serta orangtua murid juga bermanfaat bagi masyarakat yaitu dengan program babonisasi ini akan terjadi penambahan aktivitas perekonomian masyarakat dan diharapkan akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.<sup>18</sup> Dengan demikian, program ini dilaksanakan juga dalam kerangka penguatan dan pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah. Program ini adalah program yang murah, meriah, merakyat dan mudah dilakukan.

---

<sup>17</sup> Warga Bantul Minta Babonisasi Dilanjutkan, dalam <http://www.google.co.id/search?q=Warga+Bantul+Minta+Babonisasi+Dilanjutkan&hl=id&noj=1&prmd=imvns&filter=0&biw=1024&bih=368>, akses tanggal 23 september 2012.

<sup>18</sup> Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Peningkatan Gizi Anak (Babonisasi), Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2004.

Pada mulanya kebijakan ini yang dijalankan dari tahun 2003-2004 ini dibiayai dari APBD Kabupaten Bantul yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah. Kepada satu keluarga diberikan tiga ekor ayam babon untuk dipelihara. Sebagian telurnya bisa dikonsumsi sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan gizi, sebagiannya ditetaskan untuk memperbanyak populasi peliharaan.

Memelihara ayam kampung sangat mudah, jauh lebih mudah daripada beternak ayam ras. Babon memiliki sifat yang sangat domestikatif. Sekali dia bertelur disebuah tempat, maka dia akan tetap kembali ke sana untuk bertelur lagi. Jika sudah demikian, babon akan tetap kembali ke rumah / kandang yang kita sediakan. Ayam kampung termasuk peliharaan yang tidak manja dan relatif tahan terhadap berbagai macam penyakit. Mudah berbiak, telur dan dagingnya lebih enak dan bergizi, dan harga jualnya relatif lebih mahal dari ayam maupun telur ras. Karenanya, sangat tepat dijadikan agent untuk memberdayakan keluarga pra sejahtera, dan dalam skala besar dapat dijadikan lahan bisnis yang menguntungkan.

Telur ayam kampung secara ekonomis memiliki masa depan bisnis yang cukup baik. Kandungan gizi yang baik dan memiliki cita rasa yang lezat menyebabkan masyarakat menyukai telur tersebut. Masyarakat banyak yang membutuhkan telur ayam kampung, mengakibatkan permintaan telur meningkat. Tingkat permintaan telur ayam kampung yang tinggi dan cenderung terus naik, maka harga telur relatif lebih tinggi dibandingkan dengan telur lainnya.

Untuk mencapai hasil optimal, populasi ayam kampung tiap keluarga harus bisa mencapai 10 ekor babon dan satu jantan. Pada populasi demikian, jumlah telur dan penambahan populasi sudah bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan gizi keluarga, dan kelebihan populasi dapat dijual sebagai sumber pendapatan atau dipotong sebagai bahan pemenuhan gizi keluarga. Bapak Burhan Nuri menuturkan bahwa ayam yang didapat ketika bertelur, telurnya dijual dan sebagiannya digoreng untuk lauk anak-anaknya yang waktu itu masih SD dan TK.<sup>19</sup> Sama halnya yang dengan yang diutarakan David, ayam tersebut sangat membantu

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak Burhan Nuri warga Brajan Wonokromo Pleret umur 36 Tahun.

dan menambah gizi baginya.<sup>20</sup> Secara alamiah, seekor babon memiliki masa bertelur paling lama satu bulan. Babon akan berhenti bertelur jika disarangnya sudah ada 8 - 10 butir telur (tergantung varietasnya). Kemudian babon akan mengerami telurnya selama 3 minggu. Anak ayam yang baru menetas membutuhkan waktu 6 bulan untuk berpisah dari induknya dan dua bulan kemudian anak ayam yang betina sudah siap bertelur (sudah menjadi babon baru). Karenanya, untuk mencapai populasi 10 babon, dibutuhkan waktu kurang lebih satu tahun. Setelah itu, populasi ayam kampung sudah mencapai tahap keekonomian. Atinya, jumlah produksi telur dan penambahan populasi sudah bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi keluarga.

Mengingat bantuan yang diberikan pemerintah daerah dalam program babonisasi hanyalah ayam betina, dibebepara sekolah dan warga sekitar ada yang berfikir, bagaimana para babon itu bisa kawin agar bisa bertelur yang bisa menetas? Dalam rangka itu, di beberapa tempat muncul inisiatif warga masyarakat yang cukup mampu untuk berpartisipasi menopang program ini dengan cara menyumbangkan masing-masing seekor ayam jantan kepada siswa. Namun menurut David, ayam yang diberikan betina tidak masalah karena kebetulan ayam tersebut dibiarkan tidak dikasihkan kandang sehingga ayam tersebut bisa kawin dengan ayam jantan tetangga dan bertelur.<sup>21</sup>

Dampak positif kebijakan tersebut dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap peningkatan gizi keluarga terutama keluarga yang memiliki anak balita. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya kelompok sadar gizi yang dikembangkan oleh kelompok dasa wisma dengan salah satu kegiatannya arisan babon yaitu setiap tiga puluh lima hari (selapan: *Jawa*) tiap anggota secara bergilir mendapat 10 ekor ayam buras betina untuk ditenakkan.

## F. Kesimpulan

Sebagai salah satu metode dalam praktek pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat dapat dipahami sebagai

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan David warga Dusun Brajan Wonokromo Pleret Bantul umur 19 tahun.

<sup>21</sup> Wawancara dengan David warga Dusun Brajan Wonokromo Pleret Bantul umur 19 tahun

suatu proses kegiatan belajar, pencerahan, penyadaran, dan memperbesar pengaruh masyarakat tertindas dan kurang beruntung guna membebaskan mereka dari kemiskinan, keterbelakangan, dan penindasan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia ada banyak isu-isu yang meniscayakan kebutuhan terhadap pengembangan masyarakat dalam pengertian yang di atas. Isu-isu dimaksud, di antaranya adalah isu kemiskinan, isu perburuhan, isu komunitas marginal di perkotaan, isu pemberdayaan keluarga, isu desa tertinggal, dan sebagainya. Program babonisasi adalah salah satu strategi pengembangan masyarakat dalam menangani isu tersebut yaitu isu tentang kemiskinan dan isu tentang pemberdayaan keluarga.

# DAFTAR PUSTAKA

- A. Halim, "Paradigma Dakwah Pengembangan Masyarakat", dalam Moh Ali Aziz, dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2005.
- Carolina Nitimihardjo, dkk. *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial, Jakarta, 2005.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Peningkatan Gizi Anak (Babonisasi)*, Pemerintah Kabupaten Bantul, Bantul, 2004.
- Edi Suharto, 'Metodologi Pengembangan Masyarakat', *Jurnal Comdev I*, 2005.
- , *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- , *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora, Bandung, 2001.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.
- M. Syafi'I Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Paramadina, Jakarta, 1995.
- Matthew Miles B., dkk. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Mudiyono, dkk. *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta, 2005.

Soetandyo Wignyosoebroto, kata pengantar dalam Moh Ali Aziz, dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2005.

# STRATEGI PEMBERDAYAAN POSDAYA EDELWYS

Muhammad Sofiandi dan Suyanto<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Posdaya Edelwys Serut merupakan salah satu contoh model pemberdayaan masyarakat yang cukup berhasil. Keberhasilannya ini tidak lepas dari pilihan strategi yang bersifat bottom-up. Kerja pemberdayaan yang dilakukan oleh Posdaya Edelwys Serut, Desa Palbapang, Bantul ini membawa dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.*

*Kata Kunci: Strategi Pemberdayaan, Bottom Up, dan Posdaya.*

---

## **A. Pendahuluan**

Kemiskinan dan pengangguran masih sangat mudah ditemukan di hampir semua negara, termasuk di Indonesia. International Organisation Labour (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir 1999 mencapai 129,6 juta jiwa atau sekitar 66,3 persen dari jumlah seluruh penduduk. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pemberdayaan yang tepat dan cepat untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini karena tidak sedikit usaha pengentasan kemiskinan yang mengalami kegagalan dikarenakan kurang tepatnya strategi yang diterapkan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Ditengah sulitnya menemukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan kemiskinan, penulis tertarik untuk meneliti Posdaya Edelwys Serut. Hal ini dikarenakan, *pertama* Posdaya Edelwys berhasil mengurangi angka kemiskinan dari 37 KK menjadi 4 KK. *Kedua* banyaknya penghargaan yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Sofiandi merupakan mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Suyanto, M.Si adalah pengajar Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, F. Dakwah, UIN Sunan Kalijaga.

diberikan kepada Posdaya Edelwys. Bahkan Pemkab Bantul tertarik dengan strategi pemberdayaan Posdaya Edelw+/y. CWs dengan mengeluarkan SK Bupati Bantul No 99 Tahun 2012 tentang pembentukan FOKUDAYA (Forum Kader Komunikasi Posdaya). Oleh karena itu tulisan ini berusaha untuk menelisik, Strategi apa yang digunakan oleh Posdaya Edelwys dalam memberdayakan Masyarakat Serut?

## B. Landasan Teori

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Edi Suharto, 2010 : 58).

Menurut Ife pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, namun sebagai kesempatan hidup, kebutuhan hidup, mengungkapkan ide, pengaruh terhadap pranata sosial, aktivitas ekonomi, kemampuan reproduksi.

Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan. Korten dan Caner menyatakan konsep pembangunan pada rakyat memandang inisiatif dan kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Korten dan Carner mengemukakan tiga tema penting yang dianggap sangat menentukan bagi *konsep* perencanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu:

1. Penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha-



usaha kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.

2. Kesadaran bahwa kendatipun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin.
3. Kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin dalam pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal (Hary hikmat, 2010 : 91-92).

Didalam refrensi yang lain ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu, strategi tradisional, strategi *direct action* (aksi langsung), dan strategi transformasi. Ketiga strategi tersebut dikemukakan oleh oleh Mark G Hana dan Buddy Robinson. Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Strategi *direct-action* (aksi langsung) membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Strategi transformatif menunjukkan bahwa pendidikan dalam waktu jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri (Edi Suharto, 2010 : 66-67).

### **C. Gambaran Umum Posdaya**

Posdaya adalah forum komunikasi, silaturahmi, advokasi, penerangan dan pendidikan, sekaligus wadah kegiatan penguatan fungsi keluarga secara terpadu. Apabila memungkinkan Posdaya bisa dikembangkan sebagai wadah pelayanan keluarga secara terpadu, utamanya pelayanan kesehatan, pendidikan, wirausaha, dan pengembangan lingkungan yang memudahkan keluarga berkembang secara mandiri.

Posdaya lahir pada tahun 2000 dari Yayasan Damandiri yang diketuai oleh Prof. Dr. Hayono Suyono. Upaya pemberdayaan yang ditawarkan dalam Posdaya diarahkan untuk mendukung penyegaran fungsi keluarga, yaitu keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi dan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

Posdaya secara garis besar memiliki tujuan:

1. Menyegarkan modal sosial, seperti hidup gotong-royong dalam masyarakat untuk membantu pemberdayaan keluarga secara terpadu dan membangun keluarga bahagia dan sejahtera.
2. Ikut memelihara lembaga sosial kemasyarakatan yang terkecil, yaitu keluarga, yang dapat menjadi perekat masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan memiliki dinamika tinggi.
3. Memberi kesempatan kepada setiap keluarga untuk memberi atau menerima pembaharuan yang dapat dipergunakan dalam proses pembangunan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

#### **D. Mengenal Posdaya Edelwys**

Posdaya Edelwys adalah Posdaya yang berada di Dusun Serut, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak Posdaya Edelwys Serut Bantul dari Kecamatan Bantul sekitar 2 KM, dari Kabupaten Bantul jaraknya sekitar 5 KM. Sedangkan jarak yang ditempuh dari Propinsi Yogyakarta adalah 17 KM.

##### **1. Sejarah Berdirinya Posdaya Edelwys Serut Bantul.**

Awal mula berdiri Posdaya Edelwys di Dusun Serut ini diawali pasca gempa bumi 27 Mei 2006. Ketika itu Prof. Hayono Suyono sedang mengunjungi Bantul yang sedang dilanda gempa, setelah melihat-lihat keadaan sekitar. Oleh karena Bantul mempunyai potensi yang sangat besar dalam hal kegotong-royongan, Prof, Hayono berniat untuk membentuk Posdaya di empat belas kecamatan di Kabupaten Bantul, sebagai Posdaya percontohan.

Satu di antara empat belas Posdaya tersebut adalah Posdaya Edelwys Dusun Serut. Adanya bencana membuat masyarakat semakin kompak untuk meningkatkan derajat dan martabat hidup serta keagamaan. Oleh karena bencana yang terjadi, masyarakat Serut tergugah untuk membentuk sebuah kelompok pemberdayaan yang akan menjalankan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.<sup>2</sup>

Proses terbentuknya Posdaya Edelwys diawali

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Rahmad Tobadiyana selaku penanggung jawab Posdaya Edelwys pada tanggal 23 September 2012

dengan rembuk warga masyarakat yang dilakukan pada pertemuan rutin hari selasa malam. Warga yang berkumpul berjumlah 9 RT. Pada awalnya rembuk warga ini bertujuan untuk mencari solusi-solusi yang dihadapi oleh warga masyarakat Serut pasca gempa. Tetapi juga tidak semudah itu Posdaya Edelwys terbentuk, karena sering terjadi perselisihan pendapat antar warga. Namun semangat untuk rembukan atau musyawarah warga terus dijalankan sehingga pada akhirnya alamlah yang akan menyeleksi orang-orang yang punya tekad kuat ingin memajukan dan mempunyai komitmen untuk membangun Dusun Serut. Akhirnya terbentuklah kepengurusan Posdaya Edelwys.

Tabel I  
Struktur Kepengurusan Posdaya Edelwys Bantul

No	Nama	Jabatan Dalam Posdaya Edelwys
1	Rahmad Tobadiyana, S.Pd.	Penanggung Jawab
2	Prila Pridanti	Ketua
3	Endar Rismiyati	Sekretaris
4	Sri Hastuti	Bendahara
5	Wahyu Hidayat S.Pd	Koordinator Bidang Pendidikan
6	Susiyati	Koordinator Bidang Kesehatan
7	Ahmad Syamsudin, S.Pd.	Koordinator Bidang Ekonomi

## 2. Program-program Posdaya Edelwys

Posdaya Edelwys ini sudah melakukan tiga program, yaitu bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Sebagai gambaran:

### a. Bidang Ekonomi :

Terdapat beberapa kegiatan dalam program dibidang ekonomi diantaranya :

#### 1). Koperasi Dadi Makmur.

Koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan dan mengantarkan anggotanya ke kehidupan yang lebih layak dan makmur. Tujuan ini sesuai dengan nama koperasinya, Dadi Makmur atau

menjadi makmur.

Koperasi ini memiliki 86 anggota yang terdiri dari 6 UPPKS yang berkumpul setiap satu minggu sekali (setiap hari Sabtu). Koperasi Dadi Makmur melakukan kegiatan menyalurkan produk-produk yang sudah dibuat oleh masyarakat, simpan pinjam, membiayai modal usaha kecil menengah, dan membantu pembiayaan terhadap anggota koperasi yang anaknya masih sekolah dan tidak mampu untuk membiayainya.

2). Penanaman 1000 markisa.

Markisa adalah buah yang kaya manfaat dan kandungan vitamin sehingga masyarakat Serut mempunyai inisiatif untuk mengadakan gerakan penanaman 1000 markisa yang kemudian diolah menjadi sirup. Usaha ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

3). Lumbung Desa.

Makanan adalah sumber energi yang bisa membuat orang menjadi kuat dan bertenaga. Apabila makanan sudah tidak tersedia lagi maka akan terjadi kelaparan yang dapat menyebabkan kekurangan gizi dan kematian. Program lumbung desa bertujuan untuk menyimpan bahan makanan pokok ketika panen tiba karena harga padi ketika musim panen relative murah. Lumbung padi akan dibuka jika terjadi kenaikan harga beras, baik itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dijual. Dengan demikian masyarakat tidak resah ketika harga beras naik karena sudah mempunyai simpanan di lumbung desa.<sup>3</sup>

**b. Pendidikan:**

Pendidikan merupakan bidang yang penting untuk mencerdaskan dan membuka cakrawala pengetahuan masyarakat Serut oleh karena itu dimunculkanlah beberapa program yang implikasinya kepada bidang pendidikan. Adapun program-programnya adalah:

1). PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Alam.

Dinamakan PAUD alam karena mempunyai tujuan agar anak-anak sejak kecil sudah mengenal alam sehingga nantinya diharapkan akan hidup sehat, melestarikan alam dan lingkungan sekitar.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

Kader pengajar di PAUD Alam berjumlah dua belas pengajar dengan murid empat puluh dua orang. Kegiatan belajar mengajar PAUD Alam diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 15.00-17.00 WIB. Kegiatan dalam PAUD Alam ini berisi permainan edukatif dan ayunan.

#### 2). Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Desa “SIDODADI”

Kegiatan pelatihan pertanian ini dimunculkan karena mayoritas penduduk dusun Serut berprofesi sebagai petani. Kegiatan yang dilakukan antara lain, kegiatan pembuatan pupuk organik, budidaya padi organik, dan pengelolaan sampah.

#### 3). Perpustakaan JAYARI.

Jayari merupakan salah satu nama tokoh masyarakat yang memberikan wakaf tanah untuk kegiatan pemberdayaan di Serut. Ia juga merupakan tenaga pengajar TPA. Nama Jayari sering juga diplesetkan oleh Pak Toba sebagai singkatan dari Jayalah RI (Republik Indonesia). Perpustakaan Jayari berfungsi sebagai penyimpanan buku-buku, tempat membaca, juga sering dipakai oleh masyarakat sebagai tempat pertemuan, ruang diskusi, tempat pemilihan, sampai penerimaan tamu.

#### 4). TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) :

Al-Qur'an adalah pedoman hidup manusia sepanjang zaman, dari Nabi Muhammad sampai akhir zaman sehingga dimanapun Al-Qur'an selalu dibaca dan wajib dipelajari, termasuk di Serut. Di Serut terdapat dua TPA, yaitu TPA Al-Murtado dan TPA Al-Falah. Walaupun di Serut mempunyai dua TPA tapi mereka saling membantu satu sama lain. Dengan demikian terjagalah kerukunan antar sesama.

#### 5). Bina Keluarga Remaja:

Ramaja sangat penting di kehidupan sehari-harinya, bahkan Soekarno pernah mengatakan “Berikan aku sepuluh pemuda maka aku akan mengguncangkan dunia”. Karena sangat pentingnya pemuda untuk generasi selanjutnya maka di Dusun Serut sendiri diadakan kegiatan BKR (Bina Keluarga Remaja). Tujuan dari program ini adalah member pengetahuan

agar orang tua bisa mendidik anak-anaknya yang sudah menginjak usia remaja sehingga mereka tidak terjerumus oleh pengaruh lingkungan yang negatif. Jumlah kader/pendamping ada delapan orang, sedangkan anggotanya berjumlah sembilan puluh orang. Adapaun waktu kegiatannya dilakukan setiap satu bulan sekali. Dan bertempat di tiap-tiap anggota setiap bulannya (bergiliran).<sup>4</sup>

**c. Bidang Kesehatan:**

Untuk menjadi masyarakat yang sejahtera dan berdaya salah satu unsur yang harus dimiliki adalah sehat jasmani maupun rohani sehingga masyarakat merasa penting untuk membuat program yang terkait dengan kesehatan. Diantara program-program kesehatan yang dimaksud adalah:

1). Posyandu Balita

Pos pelayanan terpadu (posyandu) merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh warga Serut terhadap anak-anak yang masih dibawah umur (balita). Hal ini dilakukan agar mencegah terjadi kekurangan gizi.

Kegiatan posyandu diadakan setiap satu bulan sekali, tepatnya pada tanggal 22 setiap bulannya mulai pukul 09.00 sampai 12.00. Adapun jenis kegiatan yang mereka lakukan adalah menimbang berat badan, member penyuluhan, penambahan vitamin A, dan pengobatan dari puskesmas keliling setiap dua bulan.

2). Kelompok Donor Darah

Tujuan dari kelompok donor darah adalah membantu masyarakat Serut khususnya dan umumnya masyarakat yang ada dim luar Serut seperti transfusi darah, kecelakaan yang memerlukan bantuan donor darah. Kelompok ini ditangani oleh Karang Taruna.<sup>5</sup>

## **E. Strategi Pemberdayaan Posdaya Edelwys Serut**

Resep keberhasilan Desa Serut sehingga jadi desa percontohan terjadi karena:

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan penjaga perpustakaan, pada tanggal 12 Nopember 2012.

<sup>5</sup> Aziz Muslim, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Posdaya Edelwys Serut Palbapang Bantul Kabupaten Bantul*, Penelitian tidak diterbitkan, 2011, hal 46.

## 1. Mempunyai Visi dan Misi Pemberdayaan.

Visi dan misi pemberdayaan yang diambil adalah *"bangunlah jiwanya bangunlah badannya"* dan bertekad untuk selalu mempertahankan semangat kebersamaan dalam menjalankan pembangunan. Visi *"bangunlah jiwanya bangunlah badannya"* member pedoman bahwa proses pemberdayaan yang pertama kali dibangkitkan bukan pengumpulan materi (modal), tapi penyadaran akan tekad, keimanan, serta keyakinan bersama (raga).

## 2. Mengintegrasikan Empat Pilar Pemberdayaan.

Empat pilar yang harus ada dalam pemberdayaan adalah pemerintah, perguruan tinggi, pengusaha dan masyarakat.

- a. Pilar Pemerintah: artinya program pemberdayaan masyarakat harus melibatkan pemerintah karena mereka mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam pembentukan dan pengembangan. Mereka punya kewenangan untuk membuat kebijakan. Posdaya tidak bisa berada di Bantul jika tidak ada kebijakan pemerintah.
- b. Pilar Perguruan Tinggi: professor, doktor adalah gelar untuk orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kemampuan intelektual-olah pikir yang tidak dimiliki oleh semua orang pada umumnya. Gelar-gelar tersebut diperoleh dengan perjuangan dan waktu yang tidak singkat sehingga tidak semua orang bisa menempuhnya. Pemilik gelar tersebut harus dimanfaatkan dan digandeng dalam mengembangkan Posdaya. Contohnya di UGM yang mempunyai spesifikasi di bidang pertanian, maka mereka diajak ke Serut untuk mengembangkan pertanian, UIN spesifikasinya di bidang agama maka mereka harus mengembangkan di bidang agama.
- c. Pilar pengusaha: pengusaha juga dilibatkan dalam pemberdayaan keluarga/Posdaya. Tujuan dari pilar ini adalah mengenalkan produk-produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat Serut ke masyarakat umum (pemasaran).
- d. Pilar Masyarakat. Masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting apabila masyarakat tidak

menginginkan perubahan maka tidak akan dapat terjadi apa-apa. Oleh karena itu perlu untuk sering berdiskusi di antara masyarakat sehingga semua punya kesadaran yang sama. Sebagian besar warga masyarakat Serut sudah sadar akan pentingnya perubahan menuju hidup yang mandiri dan sejantera lewat delapan pilar keluarga (keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi dan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan).

Hal yang demikian sesuai dengan teorinya Mark G Hanna dan Budy Robinson tentang Strategi *direct-action* (aksi langsung), yaitu strategi yang membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Artinya masyarakat Serut sudah sadar akan pentingnya sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan mereka.

### 3. **Filosofi ATM (Amati Tiru Modifikasi)**

ATM adalah strategi yang diambil oleh Rahmad Tobadiyana dalam mengembangkan program di Serut. ATM terdiri dari huruf A yang artinya amati. Maksud kata amati adalah setiap ada program yang belum ada, maka pengurus Posdaya akan mengamati program baru di daerah lain yang dianggap berhasil. Setelah diamati maka langkah selanjutnya adalah T (tiru), meniru dalam hal kebaikan tidak dilarang dalam pandangan agama Islam maupun dalam hukum negara. Langkah yang terakhir adalah M (modifikasi). Agar Posdaya Edelwys tidak disebut sebagai plagiator dalam program maka harus ada yang namanya modifikasi. Modifikasi ini adalah bagaimana cara program yang sudah ditiru kemudian ditambahi, ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan yang ada.<sup>6</sup>

### 4. **Filosofi/Teori Tarzan**

Tidak semua keberhasilan itu dicapai dengan cara yang instan, tetapi membutuhkan proses yang lama. Terkadang didalam menjalani proses pemberdayaan didalam masyarakat, sering ditemui kesulitan-kesulitan yang muncul silih berganti. Di antara masalah yang

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Rahmad Tobadiyana selaku penanggungjawab Posdaya Edelwys pada Tanggal 25 September 2012.



sering muncul dalam pemberdayaan adalah masalah yang datang dari internal masyarakat itu sendiri, yang akan diajak melakukan pemberdayaan. Sama juga halnya dengan pemberdayaan yang ada di Posdaya Edelwys Serut, mengalami permasalahan dalam proses berjalannya, diantaranya adalah proses dari dalam, yaitu sebagian masyarakat tidak setuju untuk diadakannya Posdaya Edelwys Serut maka harus ada strategi untuk memberikan solusi yang tepat.

Menurut Rahmad Tobadiyana harus ada beberapa strategi untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada. Salah satu strategi yang digunakan adalah teori Tarzan.

Ketika masyarakat umum mendengar nama Tarzan maka akan sejenak berfikir dan langsung menghubungkan ke hutan. Walaupun demikian ketika film Tarzan itu diputar maka akan ada sebagian pelajaran yang dapat diambil oleh penonton. Tarzan takut sama istrinya Jane, sedangkan Jane takut sama singa tetapi singa takut dengan Tarzan. Tarzan, Jane, dan singa masing-masing mempunyai kelemahan dan kekuatan. Dari kekurangan dan kelebihan antara satu dengan yang lain, maka akan timbullah sifat saling kontrol, sehingga akan menjaga situasi dan kondisi tetap stabil.<sup>7</sup>

Dari ilustrasi di atas dalam pemberdayaan pasti ada halangan dan rintangannya baik dari internal maupun dari eksternal, sehingga perlu solusi. Solusi yang dimiliki oleh Pak Toba dalam memberdayakan warganya adalah: apabila warga masyarakat tidak menurut pada Dukuhnya, maka yang mengambil eksekusi untuk memberi pengertian kepada warga adalah Kiyai/Mbah kaum. Ketika dia mengalami kesulitan dalam melakukan penyadaran terhadap warganya, dengan meniru gaya dan teorinya Tarzan maka Bapak Rahmad Tobadiyana berhasil menyelesaikan permasalahan tanpa merusak hubungan masyarakat satu dengan yang lain. Konsep kepemimpinan teori Tarzan berbeda dengan konsep "Kiyai" (ketokohan) karena konsep tersebut merupakan konsep kepemimpinan yang saling mengontrol antara yang satu dengan yang lain.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Rahmad Tobadiyana selaku Penanggungjawab

## 5. Strategi Ombak

Menurut Bapak Rahmad Tobadiyana terkenal, Posdaya Edelwys Serut karena ombak yang mereka ciptakan. Terkenalnya Posdaya Edelwys di sebagian wilayah Indonesia bahkan sampai menembus mancanegara dilakukan bukan atas promosi, tetapi karena ombak yang dihasilkan oleh Posdaya Edelwys. Artinya pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat Serut sudah dapat dikatakan berhasil dan menjadi percontohan dalam beberapa bidang, seperti berhasilnya mengentaskan kemiskinan di pedukuhan Serut yang dulunya dari 37 KK kemudian menjadi 4 KK (tahun 2011), pembuatan pupuk organik, penanaman buah, sayur, padi organik, penanaman seribu buah markisa. Sehingga dari keberhasilan beberapa program yang ada, maka akan terjadilah pemberdayaan yang berkualitas. Keberhasilan program akan menjadi ombak-ombak yang nantinya akan memberi getaran terhadap wilayah sekitar. Sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan, apabila program yang ada mempunyai nilai kualitas yang tinggi, maka akan besar pula ombak yang diciptakan.

Sebelum menciptakan ombak, maka harus ada batu besar sebagai pemicu ombak tersebut. Ombak bisa tercipta karena ada sesuatu yang menggerakkannya. sehingga menurut Rahmad Tobadiyana ombak bisa tercipta apabila ada batu yang masuk kedalam air. Semakin besar batu yang dimasukkan kedalam air maka semakin besar juga ombak yang dihasilkan. Dari ilustrasi di atas dapat diambil kesimpulan, semakin berkualitas pemberdayaan di suatu tempat maka akan ada dampak yang besar juga bagi masyarakat sekitar dan luar.<sup>9</sup>

## F. Kesimpulan

Posdaya Edelwys Serut adalah salah satu program pemberdayaan yang ada di Kabupaten Bantul dengan tujuan untuk mengaktifkan delapan fungsi keluarga sehingga tingkat kesejahteraan ekonomi semakin membaik yang nantinya akan menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera. Walaupun di Serut baru terlaksana tiga fungsi yaitu fungsi pendidikan,

---

Posdaya Edelwys pada tanggal 25 September 2012.

<sup>9</sup> *Ibid*

kesehatan dan ekonomi, namun sudah berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kunci keberhasilan Posdaya Serut adalah terjalannya kerjasama semua pihak-pihak yang ada di lingkungan Serut dan pemilihan strategi yang tepat, mulai dari teori Tarzan, ATM, sampai filosofi ombak.

## DAFTAR PUSTAKA

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung, 2010.

Soetomo, *Strategi strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Aziz Muslim, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Posdaya Edelwys Serut Palbapang Bantul Kabupaten Bantul*, Penelitian tidak diterbitkan, 2011.

Internet:

[http://www.Posdaya.com/index.php?option=com\\_content&view=article &id=53:Posdaya-wadah-partisip](http://www.Posdaya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53:Posdaya-wadah-partisip). Akses tanggal 10 September 2012.

[http://lppm.ipb.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=23\\_59:101-cara-mengenal-posda](http://lppm.ipb.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=23_59:101-cara-mengenal-posda). Akses tanggal 20 September 2011.

<http://www.gemari.or.id/cetakartikel.php?id=5667> Akses tanggal 20 September 2011.

# KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT: Kisah Berkembangnya Batik Bantul

Pajar Hatma Indra Jaya<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Batik banyak diproduksi oleh pengusaha skala rumah tangga di Bantul. Meskipun batik merupakan warisan budaya yang tak ternilai, namun usaha batik mengalami pasang surut sehingga membutuhkan rekayasa sosial untuk mengembalikan kejayaan batik. Perubahan sosial budaya yang terjadi di Yogyakarta memperlihatkan pakaian batik tidak lagi digunakan sebagai pakaian sehari-hari, hanya wanita tua jawa yang masih menggunakan batik (tapih) sebagai pakaian sehari-hari, dengan demikian batik akan hilang seiring matinya generasi tua. Alih generasi batik (tapih) sebagai pakaian sehari-hari tidak berjalan mulus, terjadilah pemudaran cara berpakaian orang jawa sehingga permintaan akan batik berkurang. Jika permintaan batik berkurang maka usaha batik akan mengalami masalah. Rekayasa sosial berupa kebijakan mempunyai peran yang signifikan dalam menyelamatkan usaha batik. Hal ini nampak dari perkembangan sentra industri batik di Bantul yang berkembang pesat sejak tahun 2007. Pemkab Bantul mengeluarkan kebijakan guna membangkitkan usaha batik dengan cara rekayasa pasar menjadikan batik sebagai pakaian dinas pegawai di Bantul. Sejak tahun 2007 Pemkab Bantul mewajibkan setiap PNS menggunakan pakaian batik seminggu dua kali. Tidak hanya membuka pasar, Pemkab Bantul juga berusaha melestarikan ketrampilan batik dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Bantul No. 05 A tahun 2010 yang menjadikan batik sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah dasar sehingga keahlian membatik akan bertahan di Bantul.*

**Kata Kunci:** *Perubahan Sosial Budaya, Perkembangan Batik, Kebijakan, Rekayasa Pasar.*

---

<sup>1</sup> Dr. Pajar Hatma Indra Jaya adalah pengajar mata kuliah analisis problem sosial di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga. Mempunyai alamat email papinmbantul@yahoo.com.

## A. Pendahuluan

Jika dahulu membicarakan batik maka stok pengetahuan akan memunculkan kota-kota seperti Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, dan Cirebon, namun saat ini makin banyak lagi nama kota yang muncul ketika menyebut batik. Salah satu kota yang fenomenal perkembangan batiknya adalah Bantul dengan corak batik bantulan<sup>2</sup>. Saat ini, di Bantul terdapat 52 pengusaha batik dengan 781 pengrajin,<sup>3</sup> padahal tahun 1994 baru terdapat 34 pengusaha batik yang mempekerjakan 291 pengrajin.<sup>4</sup>

Apakah pertumbuhan jumlah pengrajin batik ini muncul secara alamiah, atautkah perkembangan ini terjadi karena rekayasa terencana. Menilik perkembangan batik sekitar tahun 2000-an, banyak pengusaha batik gulung tikar karena maraknya impor kain dari Cina, naiknya harga bahan baku batik yang masih harus diimpor,<sup>5</sup> dan berkembangnya industri tekstil nasional. Selain itu, tekanan terhadap batik tulis dan batik cap telah nampak ketika munculnya batik printing pada tahun 80-an.<sup>6</sup>

Khusus untuk pengrajin batik di wilayah Bantul, bencana gempa bumi tahun 2006 menambah berat persoalan para

---

<sup>2</sup> Perlu dibedakan antara batik bantul dengan batik corak bantulan. Istilah pertama mengacu pada entitas kewilayahan, sedangkan istilah kedua dimaknai sebagai salah satu corak dari jenis batik. Penjelasan lebih lanjut ada di salah satu sub-bab dalam tulisan ini (Sub-bab dengan judul Batik Bantul/Batik Bantulan).

<sup>3</sup> Diolah dari tulisan Riyantono, dkk (2010) pada halaman 65 sampai 95 tentang profil pengrajin batik di wilayah Bantul.

<sup>4</sup> Pada waktu itu, pengusaha batik terbanyak di DI Yogyakarta berada di Kota Yogyakarta yang berjumlah 60 dengan 499 orang tenaga kerja. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul terdapat 48 pengusaha batik, namun hanya mempekerjakan 60 orang (PIKM DIY, *Katalog Batik Khas Yogyakarta*, Kanwi Dept./Dinas Perindustrian Propinsi DIY, Yogyakarta, 1996, hal 3). Saat ini, di Kecamatan Imogiri saja terdapat 19 pengusaha batik dengan jumlah pekerja sekitar 581 orang.

<sup>5</sup> Hal ini terjadi karena naiknya kurs dolar ketika krisis moneter tahun 1998.

<sup>6</sup> Pada sekitar tahun 1980-an, sebagian pengusaha batik cap dan tulis di Surakarta terpaksa harus tutup karena munculnya pabrik batik printing yang mampu memproduksi batik dengan jumlah banyak dalam waktu cepat. Sebagai perbandingan, pembuatan satu batik cap membutuhkan waktu tiga minggu sampai satu bulan, 10 batik cap dapat dihasilkan dalam waktu satu hari, sedangkan batik printing dapat menghasilkan puluhan ribu lembar dalam waktu satu hari. Lihat tulisan Nurhadiantomo, *Konflik-Konflik Sosial Pri dan Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*, UMS Press, 2004, hal 196 dan Mahendra Wijaya, *Ekonomi Komersial Ganda: Perkembangan Kompleksitas Jaringan Sosial Ekonomi Perbatikan di Surakarta*, UNS Press, 2011, hal 65, 66.

pembatik. Beberapa rumah produksi batik di wilayah Kecamatan Pandak dan Imogiri roboh dan semangat untuk membatik turut hancur seiring rusaknya alat-alat produksi batik. Namun dengan sentuhan kebijakan, batik tidak “mati”, bahkan menunjukkan eksistensinya dan berpotensi besar sebagai pendorong perkembangan ekonomi masyarakat.

Bertahannya batik dalam tekanan tersebut mengindikasikan adanya perubahan sosial terencana dengan intervensi ataupun rekayasa sosial yang sistematis yang diatur oleh aktor-aktor tertentu. Tulisan ini akan melihat strategi intervensi yang dilakukan Pemkab Bantul dengan meninjau sejarah perkembangan batik bantul. Strategi apa yang dilakukan oleh Pemkab Bantul untuk melakukan pengembangan batik bantul.<sup>7</sup>

## **B. Kebijakan Sosial Yang Responsif Kunci Pengembangan Masyarakat**

Kebijakan sosial dapat disamakan dengan kebijakan publik. Edi Soeharto (2010: 107) menjelaskan bahwa kebijakan adalah seperangkat tindakan (*course of action*), kerangka kerja (*framework*), petunjuk (*guideline*), rencana (*plan*), peta (*map*) atau strategi yang dirancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah ke dalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial. Jika mengacu pada *Kamus*

---

<sup>7</sup> Tidak hanya batik, setelah reformasi banyak bidang di Bantul yang mengalami percepatan. Sebagai gambaran dalam makro ekonomi, pendapatan daerah Bantul mengalami lonjakan, dimana pada tahun 1997/1998 pendapatan Bantul baru mencapai 6,01 milyar, tahun 2002 berkembang menjadi 22,4 milyar, tumbuh menjadi 32,8 milyar pada tahun 2003, tahun 2009 bertambah menjadi 88,69 milyar dan saat ini telah meningkat menjadi menjadi 161 milyar (tahun 2012). Dilihat dari perkembangan kota, pertumbuhan Kota Yogyakarta tidak lagi hanya bergerak ke utara (baca Sleman), di bagian selatan (baca: Bantul) gairah pembangunan juga nampak. Pabrik dan perumahan bermunculan di Bantul. Dilihat dari prestasi dalam bidang pendidikan, peringkat nilai prestasi kelulusan di Bantul juga bersaing dengan Kota Yogyakarta. Beberapa kali prestasi siswa Bantul mengungguli prestasi siswa Kota Yogyakarta. Secara umum kebanggaan sebagai putra Bantul meningkat, masyarakat Bantul tidak lagi malu untuk menyebut alamatnya ketika berkenalan. [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id), Kontribusi *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Bantul*, <http://www.bantulkab.go.id/berita/1638.html>, diunduh 11 Januari 2013. Lihat juga Cungi Kusdarjito, *Program Pengentasan Kemiskinan*, 30 Mei 2007. <http://www.forplid.net/studi-kasus/8-kepemimpinan-kepemimpinan-/119-program-pengentasan-kemiskinan-.pdf>.

*Besar Bahasa Indonesia*, kebijakan dapat diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kebijakan dapat juga diartikan sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.<sup>8</sup> Secara lebih sederhana, kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari rekayasa sosial-intervensi sosial yang berisi seperangkat aturan atau garis pedoman untuk melaksanakan satu pekerjaan sebagai respon atas satu situasi guna mencapai tujuan secara cepat, efektif, dan efisien. Dalam kebijakan terkandung unsur 1). Otoritas yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan, 2). Aturan (prosedur) yang harus dilaksanakan, 3). Sanksi.

Mahfud (1998: 25) membagi kebijakan menjadi dua, yaitu kebijakan yang bersifat ortodoks dan kebijakan yang bersifat responsif. Kebijakan yang bersifat ortodoks merupakan kebijakan yang bercirikan positif-instrumental, yakni kebijakan yang difungsikan sebagai alat pelaksana ideology negara yang cenderung tertutup dari tuntutan kelompok atau masyarakat. Kebijakan ini bersifat *top down* yang disesuaikan dengan keinginan penguasa. Sedangkan kebijakan yang bersifat responsive adalah kebijakan yang muncul sebagai bagian dari keinginan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ada yang hanya menguntungkan pembuat dan kroni-kroninya, namun ada juga kebijakan yang dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Studi Richard Robinson (1986) dan Yahya A. Muhaimin (1991) menemukan bahwa kaum kapitalis (pengusaha) di Indonesia bukan merupakan borjuis yang independen, akan tetapi mereka adalah para pejabat negara, perwira militer, keluarga, teman, dan pedagang Cina yang dekat dengan pejabat negara. Dengan kata lain kedua studi tersebut menengarai bahwa banyak munculnya pengusaha di Indonesia terjadi karena diuntungkan oleh kebijakan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang diambil belum bersifat responsive guna memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup>

Kebijakan yang bersifat responsive merupakan kebijakan

<sup>8</sup> <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

<sup>9</sup> Lihat Hempri Suyatna, *Dominasi Elit Lokal Dalam Arena Pengembangan Industri Kecil Di Era Desentralisasi (Studi Kabupaten Banaran Provinsi Mataram)*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Sosiologi UGM, Yogyakarta, 2012.



yang mampu berdampak pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini antara lain nampak dari kebijakan Pemkab Bantul yang menggratiskan retribusi pasar tradisional dan pungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pasca gempa bumi tahun 2012. Kebijakan tersebut dibuat karena pemerintah melihat masyarakat sedang mengalami keterpurukan akibat bencana alam sehingga pemerintah perlu membantu, minimal dengan penggratiskan segala bentuk iuran negara agar mereka cepat bangkit dari keterpurukan.

Dilihat dari dampak atau tujuannya, kebijakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan yang dibuat dengan maksud untuk menghambat perubahan, namun ada juga kebijakan yang dimaksudkan untuk mempercepat proses perubahan. Sebagai contoh, Pemkab Bantul mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul. Kebijakan ini bertujuan untuk menghambat masuknya toko modern secara massif dan juga mall yang dikawatirkan akan meminggirkan pasar tradisional. Contoh lain dari kebijakan yang berusaha mempercepat target sasaran adalah “kebijakan benteng” pada tahun 1950 sampai 1957 yang dimaksudkan untuk mendorong naiknya kelas pengusaha “pribumi” Indonesia.<sup>10</sup>

Salah satu rekayasa kebijakan sosial yang dapat dilakukan terkait dengan batik adalah rekayasa pasar. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya pemecahan masalah sosial dengan jalan melakukan percepatan perubahan yang mendorong perubahan alami menjadi perubahan terencana yang berjalan lebih cepat guna meningkatkan permintaan akan batik. Intervensi kebijakan ini punya karakter yang berbeda dengan perubahasan sosial evolusi yang berjalan lambat dan memerlukan waktu yang lama.

Dalam teori ekonomi, jumlah penawaran tergantung pada permintaan. Jika permintaan banyak maka produksi akan meningkat. Namun jika tidak ada permintaan maka produsen otomatis tidak akan memproduksi. Dalam kasus batik, jika tidak ada permintaan maka pengrajin tidak akan memproduksi. Jika tidak ada produksi maka tidak ada orang yang bekerja di batik. Jika tidak ada yang bekerja maka mereka tidak akan sejahtera. Jika tidak sejahtera dengan usaha batik maka ia

---

<sup>10</sup> Salah satu isi dari “kebijakan benteng” adalah mewajibkan 70% dari pemegangan saham perusahaan harus dimiliki “bangsa Indonesia asli”.

akan menghentikan usaha batiknya dan beralih ke bidang lain. Jika tidak ada yang bekerja di sektor batik maka batik akan punah, padahal batik merupakan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu dibutuhkan intervensi pasar guna memperbanyak permintaan akan batik sehingga pengrajin sejahtera. Namun, jika pasar terbuka lebar, tetapi tidak ada produsen batik dapat menimbulkan masalah baru karena perlu mendatangkan barang dari daerah lain. Oleh karena itu, selain membuka pasar diperlukan upaya peningkatan ketrampilan sumber daya manusia Bantul dalam usaha batik sehingga tersedia tenaga kerja dan calon pengusaha-pengusaha baru.

### C. Batik Bantul/Batik Bantulan

Batik berasal dari bahasa jawa "*mbatik*", yaitu *mbat* yang merupakan kependekan dari *ngembat* atau melontarkan dan *tik* yang merupakan kependekan dari titik sehingga batik diartikan sebagai melemparkan titik berkali-kali dalam selembar kain (Tim Sanggar Batik Barcode, 2010: 3). Selain itu ada yang mengartikan batik dari kata "*amba*" dan "*titik*" yang artinya menulis titik. Pengertian ini dibenarkan oleh para pembatik di Pijenan dan Pajimatan.

Istilah batik bantul atau lebih tepatnya disebut batik bantulan dimaknai sebagai kumpulan corak batik yang khas dari satu jenis batik, yaitu corak batik yang menjadikan keraton sebagai "*kiblat*" yang layak ditiru, namun tetap berusaha membedakan dengan karakter batik keraton Yogyakarta. Perbedaan ini terjadi secara sengaja sebagai penghormatan kepada keluarga keraton agar batik yang ada di masyarakat tidak sama persis dengan batik yang digunakan keluarga keraton. *Ora ilok* jika pakaian *kawula* sama dengan *gusti*-nya. Dengan demikian batik bantulan adalah batik kawula atau batiknya masyarakat biasa.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Batik bantulan punya kaitan sejarah dengan Kerajaan Mataram, batik di Kerajaan Mataram punya kaitan dengan Masa Majapahit dan masa Majapahit punya kaitan dengan kebudayaan India. Cukup susah untuk menyebut darimana batik Indonesia pertama kali berasal. Beberapa sejarawan mengatakan batik berasal dari India, beberapa lagi mengatakan yang berasal dari India hanya pengaruh idenya. Sedangkan yang mengembangkan batik di Indonesia, termasuk filosofinya adalah bangsa Indonesia sendiri. Perlu dicatat juga bahwa daerah-daerah di Indonesia yang tidak bersinggungan dengan kebudayaan India, seperti Toraja dan Irian (Papua) juga mengenal batik (S.K. Sewan Susanto, 1980: 307).

Dilihat dari karakter fisik (baca warna), oleh karena "kiblat" batik bantulan adalah keraton maka batik bantulan juga menggunakan corak warna yang mirip dengan keraton Yogyakarta, yaitu warna-warna coklat, hitam, dan juga putih, namun batik bantulan sengaja dibuat lebih kasar dibandingkan dengan batik keraton. Batik bantulan sangat berbeda dengan karakter batik pekalongan dan juga Cirebon yang dominan warna-warna mencolok.

Selain itu alasan batik bantul tidak bisa dilepaskan dari batik keraton karena keraton pernah berada di Pleret Bantul sehingga produksi batik keraton juga dilakukan di Bantul. Selain itu banyak abdi dalem keraton yang berasal dari Bantul diberi ketrampilan membatik oleh keraton, karena mereka menetap di daerah Bantul maka corak yang mereka buat berkembang di Bantul. Sebagai contoh abdi dalem yang menjaga makam raja-raja di Pajimatan Imogiri akhirnya melahirkan batik klasik pajimatan.

Dalam buku *Batik Bantul*, Pemkab Bantul telah mendokumentasikan 53 motif batik asli Bantul. Meskipun perlu diberi catatan bahwa dari 53 motif batik asli bantul tersebut ada beberapa motif batik yang tidak mencerminkan atau "berkiblat" pada keraton karena menggunakan warna yang tidak lumrah, seperti motif irian yang menggunakan warna dasar oranye. Dengan demikian, batik bantul yang ada di buku tersebut lebih dimaknai sebagai batik yang dibuat oleh seniman yang tinggal di Bantul. Tulisan ini tidak akan membicarakan lebih lanjut perdebatan makna batik bantul sebagai corak, namun akan lebih fokus melihat proses perkembangan batik di wilayah Bantul.

#### **D. Rekayasa Pasar**

Batik awalnya merupakan pakaian tradisional Jawa, namun saat ini telah menjadi pakaian nasional. Tidak hanya orang bermata lebar dengan kulit sawo matang. Orang-orang Thionghoa saat ini juga biasa menggunakan batik. Meskipun demikian di tahun 90-an batik terasa mendapat tekanan hebat. Baju batik hanya digunakan di perayaan-perayaan tertentu. Bahkan tidak terjadi regenerasi pemakai batik untuk aktivitas sehari-hari.

Di era ini, batik tidak lagi digunakan oleh perempuan-perempuan Jawa untuk aktivitas sehari-hari. Padahal pada

zaman dulu perempuan jawa selalu mengenakan bawahan dalam bentuk *selendang* dan *tapih (jarik)*<sup>12</sup> sebagai pakaian harian atau ketika bepergian. Namun saat ini hal itu telah berubah, ketika mengamati pasar tradisional sebagai “habitat” perempuan jawa berjarik, wajah pasar mulai mengalami pemudaran. Hanya wanita tua yang berusia 60 tahun ke atas yang masih menggunakan batik sebagai penutup tubuh, sebagian yang lainnya telah beralih mengenakan rok dan celana panjang.<sup>13</sup> Wanita generasi kelahiran 60-an atau sebelumnya (usia 50-an ke bawah) tidak lagi mengenakan *jarik*. *Jarik* hanya digunakan ketika menghadiri acara-acara adat, seperti pernikahan. Tidak praktis dan terkesan tidak modern menjadi bingkai yang membuat jaritan ditinggalkan. Untuk laki-laki, model pakaian tradisional jawa yang dibuat dari batik sudah lebih lama ditinggalkan dan hanya dikenakan ketika menghadiri perayaan. Padahal di masa lalu, para laki-laki jawa mengenakan ikat kepala yang dibatik dan juga *jarik* sebagai pakaian bawah.

Perubahan cara berpakaian orang jawa membuat permintaan pasar akan batik jauh berkurang, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk menyelesaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat agar batik tetap diproduksi. Salah satu usaha Pemkab Bantul untuk menyemarakkan kembali usaha batik adalah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pakaian batik digunakan sebagai seragam kantor dan sekolah. Akibatnya pasar baru mulai terbuka.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam pasal 14 ayat 1 tentang Pakaian Kerja disebutkan bahwa salah satu pakaian kerja aparatur pemerintah Bantul ditetapkan menggunakan batik, yaitu pada hari Jum’at dan hari Sabtu.<sup>14</sup> Setelah terjadi perubahan hari kerja menjadi lima hari maka batik digunakan untuk hari Kamis dan Jumat.

---

<sup>12</sup> *Tapih (jarik)* merupakan sejenis rok yang biasa digunakan oleh perempuan jawa.

<sup>13</sup> Pengamatan (observasi) di Pasar Tradisional Pundhong Bantul (Minggu Wage, 20 Januari 2013) pukul 8.00 WIB.

<sup>14</sup> Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Sedangkan untuk guru yang harus bekerja enam hari maka pada hari sabtu juga mengenakan pakaian batik. Aturan ini mengandung pendisiplinan dalam bentuk sanksi bagi orang yang tidak mengikutinya. Bisa dibayangkan berapa tambahan permintaan batik, jika jumlah PNS di Bantul ada sekitar 12.703<sup>15</sup> yang mana dalam seminggu mereka wajib mengenakan pakaian batik dua kali. Tidak hanya pegawai negeri, anjuran penggunaan seragam batik juga merambah ke sekolah-sekolah.

Kebijakan Pemkab Bantul ini dipengaruhi oleh keprihatinan akan nasib pedagang batik setelah terkena gempa dan juga banyaknya organisasi sosial yang mendampingi para pengrajin batik pasca gempa bumi. Sebagai bentuk dukungan pemerintah akan usaha masyarakat menghidupkan kembali batik maka keluarlah peraturan bupati bantul.

Ketentuan adanya pakaian wajib batik bagi pegawai mampu memacu produksi dan penjualan batik lokal Bantul. Akibat dari adanya permintaan batik yang tinggi setelah kebijakan tersebut, maka pada tahun 2007 muncul beberapa usaha produksi batik baru. Beberapa orang menangkap usaha baru tersebut sehingga muncullah usaha batik di delapan kecamatan. Beberapa usaha muncul di lokasi yang benar-benar baru, namun beberapa usaha bangkit kembali dari usahanya yang pernah "tidur".<sup>16</sup>

Pasar batik makin terbuka ketika Unesco pada tanggal 28 September 2009 menetapkan batik sebagai warisan dunia karena memiliki banyak simbol yang bertautan erat dengan status sosial, kebudayaan, alam, dan sejarah. Unesco menilai bahwa batik merupakan identitas bangsa Indonesia dan menjadi bagian penting seseorang di Indonesia sejak lahir hingga meninggal, dimana pada setiap tahap upacara dalam siklus kehidupan di gunakan batik dengan motif tertentu.<sup>17</sup> Sebagai

---

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, *Bantul Dalam Angka*, BPS Kab. Bantul, Bantul, 2008.

<sup>16</sup> Perlu diberi catatan, menurut M. Noor Romadhon (2012; 12) ada beberapa usaha batik di Bantul yang kemunculannya sangat instant karena dimaksudkan sebagai wadah untuk mengambil dana dari lembaga-lembaga internasional yang memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat pasca gempa yang terjadi di Bantul tahun 2006.

<sup>17</sup> Sebagai contoh batik dengan motif truntum mangkoro digunakan orangtua pengantin ketika dilakukan upacara panggih pengantin, motif wahyu tumurun biasa digunakan ketika upacara mitoni, ataupun motif yuyu sekandang untuk acara siraman.

puncak pengakuan batik maka pada tanggal 2 Oktober 2009 di Paris, Unesco mengukuhkan batik sebagai warisan budaya dunia milik bangsa Indonesia. Tanggal itu kemudian diperingati sebagai hari batik, tidak hanya diperingati sebagai hari batik nasional, namun Unesco menetapkannya sebagai hari batik dunia.

Penghargaan Unesco terhadap batik mempunyai efek turunan yang memicu perkembangan batik di Indonesia. Pemerintah pusat kemudian menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan baru tersebut batik dijadikan pakaian dinas di lingkungan Kementrian Dalam Negeri yang tidak hanya digunakan sekali dalam seminggu, namun digunakan setiap hari Kamis dan Jum'at. Setelah kementrian dalam negeri menetapkan kebijakan itu maka daerah-daerah di seluruh Indonesia juga menindaklanjuti dengan edaran yang sama. Gubernur Jawa Barat kemudian "membatikkan" pakaian seragam bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jawa Barat yang juga dipakai dua kali dalam seminggu. Kebijakan ini menggeser kebijakan sebelumnya yang hanya dilaksanakan seminggu sekali. Di Klaten juga terdapat usaha yang hampir sama untuk membangkitkan kembali kain lurik.

Penghargaan dari Unesco tersebut juga berdampak pada acara-acara televisi yang banyak memberitakan batik sebagai warisan budaya adiluhung dan mensekagamkan penyiarnya dengan pakaian batik. Para artis berame-rame menggunakan batik,<sup>18</sup> akibatnya masyarakat penonton televisi juga berame-rame menirunya sehingga batik menjadi gaya hidup dan trend pakaian secara nasional.

Melihat sejarah tentang kejadian-kejadian yang mempengaruhi perkembangan batik tersebut maka kebijakan kewajiban penggunaan pakaian batik bagi pegawai di Bantul pada tahun 2007 termasuk trobosan karena pada saat itu belum ada daerah yang membuat produk hukum yang sama. Selain kebijakan tersebut Pemkab Bantul juga membuat kebijakan

---

<sup>18</sup> Salah satu acara yangmana pembawa acaranya (artis) mengenakan pakaian batik adalah acara musik Dahsyat .

pendukung. Hal itu antara lain pameran batik bantul di Jakarta, pembangunan Pasar Seni Gabusan, penyelenggaraan Bantul Ekspo, peragaan busana batik dalam acara Taman Gabusan di TVRI, dan juga pemecahan rekor Muri terkait dengan batik. Secara lebih detail usaha Pemda Bantul untuk kembali menggairahkan perkembangan batik antara lain:

1. Pameran

Pameran merupakan kegiatan untuk memperlihatkan kepada masyarakat tentang produk yang dihasilkan. Dalam pameran, pengrajin diberi ruang untuk memperlihatkan produk yang ia buat, menjelaskan makna atau fungsi produk, bahkan sampai menjelaskan proses pembuatannya. Cara ini dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah di Indonesia. Kegiatan pameran batik Pemkab Bantul antara lain dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul ke Jakarta dalam acara Mahakarya Batik Bantul 2012 sebagai rangkaian kegiatan Pekan Batik Nusantara di Museum Tekstil Jakarta.<sup>19</sup>

2. Pasar Seni Gabusan dan Bantul Ekspo

Untuk pemasaran, para pengrajin batik di Bantul banyak yang membuka *showroom* di rumahnya masing-masing, seperti batik Ya Halwa di Jalan Bantul Km 8,5, batik Sarjuni/Jogo Pertiwi di tangga naik makam raja-raja Pajimatan Imogiri, batik Topo HP dan Dirjo Sugito di Pijenan, Pandak. Batik di *showroom-showroom* tersebut paling laris menjelang lebaran atau saat musim liburan sekolah tiba.

Pada tanggal 17 November 2004, Pemkab Bantul juga meresmikan Pasar Seni Gabusan (PSG) yang dimaksudkan sebagai sentra, miniature, tempat perdagangan, dan pusat informasi awal bagi produk-produk kerajinan yang banyak terdapat di Bantul (sekitar 8.015 unit usaha kerajinan), dimana salah satunya batik.<sup>20</sup> Setelah mendapat informasi awal, jika tertarik wisatawan dapat minta tolong pegawai PSG untuk menunjukkan lokasi masing-masing pengrajin. Pendirian PSG dilakukan karena belum ada satu pasar kerajinan yang lengkap di Bantul, seperti pasar Sukowati yang terdapat di Bali, ataupun pasar batik, seperti pasar

---

<sup>19</sup> Antara News, *Batik Bantul Diperkenalkan di Museum Tekstil Jakarta*, Jumat, 30 November 2012.

<sup>20</sup> [http://bantulbiz.com/id/berita\\_baca/idb-3.html](http://bantulbiz.com/id/berita_baca/idb-3.html).

Klewer di Surakarta, padahal di Bantul banyak sekali pengrajin. Selain memberi informasi langsung, PSG juga membuat website di <http://bantulcraft.com>. Setiap tahun, di lokasi Pasar Seni Gabusan juga diselenggarakan acara Bantul Ekspo dengan tujuan menunjukkan potensi dusun di seluruh Bantul kepada masyarakat luas. Para siswa di sekolah dasar “digiring” untuk turut menyaksikan keunikan dan kekayaan Bantul lewat acara ini.

3. Taman Gabusan sebagai Media Iklan.

Bantul mempunyai acara dialog rutin di TVRI Yogyakarta dengan nama Taman Gabusan. Selain menginformasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat Pemkab Bantul, acara tersebut juga mensuguhkan kesenian-kesenian masyarakat dan peragaan busana yang menampilkan busana batik bantul. Selain TVRI, Pemkab Bantul juga bekerja sama dengan ANTV untuk memamerkan potensi batik bantul lewat acara pemecahan rekor Muri membatik terbanyak dan terpanjang pada tanggal 20 Maret 2010 di Pasar Seni Gabusan yang melibatkan 2.150 siswa sekolah se-Bantul di kain sepanjang 2.000 meter.<sup>21</sup>

4. Buku Batik Bantul

Dalam bidang pemasaran, penumbuhan *brand image*, *branding*, atau *positioning* menjadi sangat penting untuk memperluas pasar. Dalam pemasaran diperlukan usaha untuk menggerakkan merek menjadi ikon. Untuk mencapainya diperlukan penciptaan mitos yang dibangkitkan lewat pencitraan yang mencirikan suatu produk (M. Gunawan Alif, 2010: 38). Merujuk pada buku S.K. Sewan Susanto (1980) yang mendeskripsikan batik di Indonesia, nama batik bantul atau batik bantulan belum ada, padahal di buku tersebut telah ada batik ponorogo, batik tasikmalaya, batik mojosuro, batik sidoharjo, batik wonogiren yang masing-masing punya karakter unik.<sup>22</sup> Oleh karena itu diperlukan proses *iconic brand* dengan menonjolkan dan memberi beda pada karakter batik bantul. Jika batik bantul telah “kondang” maka orang akan mewajibkan dirinya untuk membeli batik bantul sebagai oleh-oleh. Wisatawan akan merasa berdosa jika

---

<sup>21</sup> [www.bantulcraft.com/berita.php?baca=41](http://www.bantulcraft.com/berita.php?baca=41)

<sup>22</sup> Misalnya batik wonogiren, punya ciri terdapat guratan-guratan dalam garis batik yang lahir dari proses lilin yang mengalami pecah-pecah halus.



ke Bantul tanpa membawa oleh-oleh batik khasnya. Untuk mencapai hal itu Pemkab Bantul membuat promosi dengan membukukan corak dan motif batik bantul lewat buku yang berjudul *Batik Bantul*.

#### **E. Memperteguh Keahlian: Batik Sebagai Muatan Lokal**

Cukup ironi jika pasar batik terbuka lebar, namun tidak lagi banyak orang Bantul yang punya keahlian membatik. Hal ini akan memunculkan masalah baru, seperti serbuan batik dari Cina, padahal batik telah diakui dunia sebagai produk budaya bangsa Indonesia.

Selain mempunyai keindahan akan corak dan warnanya, kain batik mengandung nilai-nilai filosofis yang sarat akan muatan pendidikan, etika, estetika, dan memiliki makna simbolik dalam tata hidup manusia. Dan warisan budaya ini merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Oleh karena itu selain membuka pasar diperlukan juga usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian masyarakat tentang batik.

Kebutuhan tersebut direspon oleh Pemkab Bantul dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bantul No. 05 A tahun 2010 tentang Penetapan Membatik sebagai Muatan Lokal Wajib di Kabupaten Bantul yang dimulai pada tahun 2011. Penetapan pelajaran membatik sebagai muatan lokal wajib Kabupaten Bantul menunjukkan apresiasi yang cepat dari Pemkab untuk menjawab persoalan batik dikemudian hari.

Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Pokja Kearifan Lokal dan Hak Anak yang telah berhasil menyusun dan membukukan kurikulum dan silabus pendidikan batik sebelum dilaksanakan pada tahun 2011 (Mujiasih, dkk, 2010). Dengan demikian, saat ini semua siswa sekolah dasar di Bantul punya kualifikasi mampu membatik. Proses pendidikan batik yang sistematis ini merupakan terobosan pertama kali di Indonesia.

Pendidikan batik sejak dini juga penting untuk menumbuhkan kecintaan pada produk mereka sendiri. Ada semangat berdikari dalam pelajaran membatik. Mereka bisa membuat sapu tangan, taplak meja, bahkan baju seragam sendiri tanpa tergantung dari pabrik tekstil impor. Batik memberikan penyadaran bahwa mereka bisa membuat karya untuk mereka sendiri sehingga tidak mengalami

ketergantungan dengan pabrik. Meskipun demikian perlu dipahami bahwa batik adalah sebuah produk seni sehingga dengan dijadikannya batik sebagai pelajaran muatan lokal wajib harusnya tidak menjadi beban siswa, bagaimanapun batik adalah seni yang membutuhkan ketertarikan, kecintaan, dan bakat anak.

## F. Kesimpulan

Batik dalam tekanan. Hal ini terjadi karena perubahan sosial kebudayaan yang telah melabrak dan menggeser batik yang dahulu digunakan sebagai pakaian sehari-hari mulai ditinggalkan masyarakat. Akibatnya pengrajin batik kurang sejahtera karena menurunnya permintaan batik. Namun demikian persoalan tersebut dapat diatasi lewat sentuhan kebijakan.

Bupati Bantul mengeluarkan kebijakan Nomor 02 Tahun 2007 yang mempunyai kekuatan memaksa sehingga batik kembali digunakan sebagai pakaian seragam (sehari-hari). Selain itu Pemkab Bantul juga menjadikan pelajaran batik sebagai pelajaran wajib di sekolah dan juga mengeluarkan buku tentang Batik Bantul. Usaha-usaha tersebut dilakukan sebagai *branding* agar batik bantul menjadi ikon kerajinan yang wajib dimiliki wisatawan ketika berkunjung ke Bantul. Usaha ini terbantu dengan pengakuan Unesco yang menjadikan batik indonesia sebagai *world heritage*.

Dilihat dari sifatnya, kebijakan terkait batik di Bantul bersifat responsif yang berdampak pada peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah produksi, jumlah pengusaha, dan juga jumlah pengrajin batik di Bantul. Masyarakat batik senang dengan kebijakan-kebijakan yang diambil Pemkab Bantul sehingga menganugrahi Sri Surya Widati (Bupati Bantul) sebagai Ibu Batik Bantul. Kebijakan terkait dengan batik di Bantul juga tidak melahirkan pengusaha birokrat batik yang berdiri, memonopoli, dan mengambil manfaat atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan cara kolusi serta nepotisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara News, *Batik Bantul Diperkenalkan di Museum Tekstil Jakarta*, Jumat, 30 November 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, *Bantul Dalam Angka*, BPS Kab. Bantul, Bantul, 2008.
- Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Hempri Suyatna, *Dominasi Elit Lokal Dalam Arena Pengembangan Industri Kecil Di Era Desentralisasi (Studi Kabupaten Banaran Provinsi Mataram)*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Sosiologi UGM, Yogyakarta, 2012.
- M. Gunawan Alif, *Beyond Brand Building: Menciptakan Merek Menjadi Ikon*, dalam *Majalah Desain Grafis*, Vol 06, Edisi 36 2010.
- M. Noor Romadlon, *Art (Batik) Under Pressure* dalam *Jurnal Riset Daerah*, Edisi Khusus Vol. I, No.1, Desember Tahun 2012.
- Mahendra Wijaya, *Ekonomi Komersial Ganda: Perkembangan Kompleksitas Jaringan Sosial Ekonomi Perbatasan di Surakarta*, UNS Press, Surakarta, 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Mujiasih, dkk. *Kurikulum Dan Silabus Pendidikan Batik: Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah*, Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul-Yudistira, Yogyakarta, 2010.
- Nurhadiantomo, *Konflik-Konflik Sosial Pri dan Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*, UMS Press, Surakarta, 2004.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul*.
- PIKM DIY (Proyek Pengembangan Industri Kecil dan Menengah), *Katalog Batik Khas Yogyakarta*, Kanwi Dept./ Dinas Perindustrian Propinsi DIY, Yogyakarta, 1996, hal

3).

Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz, *Oligarki dan Kapitalisme Kasus Indonesia dalam Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, LP3ES, Jakarta, 2005.

Riyantono, dkk, *Batik Bantul*, Pemerintah Daerah Kab. Bantul, 2010)

S.K. Sewan Susanto, *Seni Kerajinan Batik Indonesia*, Balai Penelitian Batik dan Kerajinan, Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri, Departemen Perindustrian RI, Jakarta, 1980.

Surat Keputusan Bupati Bantul No. 05 A tahun 2010 tentang Penetapan Membatik sebagai Muatan Lokal Wajib di Kabupaten Bantul

Tim Sanggar Batik Barcode, *Batik: Mengenal Batik dan Cara Mudah Membuat Batik*, Kata Buku, Jakarta, 2010.

Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, LP3ES, Jakarta, 1991.

#### **Data Internet:**

[www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id), *PAD Tahun 2009: Data Pokok Pembangunan Ekonomi dan Keuangan*, [http://www.bantulkab.go.id/datapokok/1004\\_pad.html](http://www.bantulkab.go.id/datapokok/1004_pad.html), diunduh 11 Januari 2013.

[www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id), *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Bantul*, <http://www.bantulkab.go.id/berita/1638.html>, diunduh 11 Januari 2013.

Cungki Kusdarjito, *Program Pengentasan Kemiskinan*, 30 Mei 2007. <http://www.forplid.net/studi-kasus/8-kepemimpinan-kepemimpinan-/119-program-pengentasan-kemiskinan-.pdf>.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

[www.bantulcraft.com](http://www.bantulcraft.com), *2150 Siswa Sekolah Se-Bantul Membatik Masuk Muri* <http://www.bantulcraft.com/berita.php?baca=41>.

# UPAYA MENJAGA EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul

Eis Al Masitoh<sup>1</sup>

## Abstrak

*Secara fisik, pasar tradisional dianggap lebih kumuh dari pasar modern. Hal itu dirasa dapat mengakibatkan orang enggan membeli di pasar tradisional dan beralih ke pasar modern yang lebih nyaman. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan revitalisasi pasar, salah satunya dilakukan di Pasar Piyungan Bantul. Revitalisasi di Pasar Piyungan merupakan keharusan karena sebagian Pasar Piyungan rusak akibat gempa bumi 2006. Revitalisasi ini telah merubah kondisi pasar menjadi lebih bersih, tertata rapi, dan mempunyai sarana pendukung, mulai kamar kecil, mushola, sampai PAUD. Namun demikian, revitalisasi pasar tidak otomatis mendorong peningkatan pembeli. Bahkan dalam jangka pendek, revitalisasi pasar membuat orang kehilangan pelanggan karena untuk sementara pasar dilakukan penataan. Untuk itu dibutuhkan proses pemulihan untuk menarik kembali pelanggan pasar yang lama.*

**Kata Kunci:** Pasar Tradisional, Revitalisasi Pasar, Dampak.

---

## A. Latar Belakang

Menurut survey yang dilakukan AC. Nielses jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 1,7 juta atau sekitar 73 persen dari keseluruhan pasar yang ada. Namun, laju pertumbuhan dari pasar modern jauh lebih tinggi dari pasar tradisional. Pasar-pasar tradisional dan pasar modern rata-rata mempunyai spesifikasi barang dagangan yang hampir sama sehingga berpeluang mengakibatkan terjadi persaingan diantara dua pasar tersebut. Jika dibiarkan persaingan bebas

---

<sup>1</sup>Eis Al Masitoh merupakan mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga.

antara kedua pasar tersebut dapat menggeser keberadaan pasar tradisional.<sup>2</sup>

Di Kabupaten Bantul, pada tahun 2009 terdapat 98 minimarket dan 29 pasar tradisional<sup>3</sup>. Jumlah ini jelas sangat timpang dan menimbulkan kekhawatiran pemerintah dan masyarakat akan eksistensi pasar tradisional. Mengingat banyak masyarakat Bantul yang menggantungkan hidupnya terhadap pasar tradisional. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul kemudian membuat beberapa kebijakan yang pro pasar tradisional agar tetap bisa mempertahankan eksistensinya. Kebijakan tersebut adalah kebijakan pembatasan minimarket dan revitalisasi pasar tradisional.

Dua kebijakan ini sangat berkaitan, karena pembatasan minimarket tanpa adanya revitalisasi pasar adalah sama saja dengan menyelesaikan masalah, namun tidak sampai ke akarnya. Kebijakan pembatasan minimarket berfungsi sebagai regulator untuk menekan laju pertumbuhan pasar modern di Bantul, sedangkan kebijakan revitalisasi pasar tradisional bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern.

Ekspansi besar-besaran minimarket di banyak daerah termasuk Kabupaten Bantul berdampak pada kelangsungan pasar tradisional di Kabupaten Bantul. Persaingan yang tidak seimbang antara pasar modern (minimarket) dengan pasar tradisional menyebabkan pemerintah Kabupaten Bantul harus melakukan intervensi untuk menyelamatkan pasar tradisional. Salah satu bentuk intervensi pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyelamatkan eksistensi pasar tradisional adalah dengan membuat kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Hal ini didasari pemikiran bahwa salah satu faktor yang mendorong pesatnya pertumbuhan pasar modern (minimarket) adalah karakter masyarakat saat ini yang lebih menyukai belanja di tempat yang nyaman. Dengan me-*revitalisasi* pasar-pasar tradisional di Bantul diharapkan dapat menambah daya saing pasar tradisional di Bantul dengan pasar modern (minimarket).

---

<sup>2</sup> Sumintarsih, dkk. "Eksistensi Pasar Tradisional Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya, Jawa Timur". 2011. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Hal 2-3

<sup>3</sup> <http://www.tribun.news.com>. diakses pada 1 November 2012 pukul 13.00 WIB

Membangun pasar tidaklah mudah. Revitalisasi pasar memakan biaya yang tinggi. Selain itu di beberapa tempat pembangunan pasar sering dianggap memarginalisasi pedagang lama karena pedagang ditarik retribusi yang lebih besar. Akibatnya bukan peningkatan kesejahteraan yang didapat, bahkan beberapa pedagang lama tersingkir karena tidak sanggup membayar retribusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tulisan ini ingin mengetahui apa dampak restrukturisasi pasar tradisional? Apakah revitalisasi pasar tradisional berdampak pada peningkatan omset pedagang? Bagaimana pengelolaan pasar baru hasil restrukturisasi? Apakah terjadi perbedaan dengan ketika belum direstrukturisasi?

Untuk mencari jawaban pertanyaan tersebut tulisan ini melihat proses revitalisasi Pasar Piyungan, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DIY. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah: 1). Pasar Piyungan merupakan salah satu pasar tradisional yang telah direvitalisasi oleh Pemerintah Daerah Bantul. 2). Pasar Piyungan telah memiliki sejumlah fasilitas penunjang modern seperti ruang khusus merokok, penitipan anak, dan lain-lain. 3). Pasar Piyungan mengembangkan program pengolahan sampah yang dikelola oleh Karang Taruna. 4). Pasar Piyungan telah menjadi model pasar tradisional ideal.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Untuk mengetahui kebaruan temuan yang akan dihasilkan penelitian ini, maka peneliti merasa perlu menyajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang fokus perhatiannya berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian itu adalah:

1. *Kebijakan Pemerintah Tentang Pasar Tradisional Di Bantul*<sup>4</sup> oleh Ahmad Izudin. Penelitian ini memiliki fokus pada kebijakan (secara umum) Pemkab Bantul tentang pasar tradisional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki dua buah kebijakan tentang pasar tradisional. Yang pertama adalah kebijakan pembatasan minimarket di Kabupaten Bantul dan yang

---

<sup>4</sup> Ahmad Izzudin, *Kebijakan Pemerintah Tentang Pasar Tradisional di Bantul*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

kedua adalah kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Bantul.

2. *Eksistensi Pasar Tradisional di Kabupaten Sleman*<sup>5</sup> oleh Utami Ayunita, memiliki fokus penelitian dinamika pasar tradisional di Desa Triharjo, Sleman dan eksistensinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pasar tradisional mengalami dinamika berupa persaingan dengan pasar modern, dan dalam hal ini inovasi kebijakan seperti pembatasan pembangunan pasar modern sangat dibutuhkan demi eksistensi pasar tradisional.

### **C. Kerangka Pemikiran: Perbandingan Pasar Tradisional dan Modern**

Pasar tradisional adalah sebuah tempat yang terbuka di mana terjadi proses transaksi jual beli yang dimungkinkan proses tawar-menawar.<sup>6</sup> Di pasar tradisional pengunjung tidak selalu menjadi pembeli, namun ia bisa menjadi penjual. Bahkan setiap orang bisa menjual dagangannya di pasar tradisional. Hal ini berbeda dengan toko modern yang banyak tumbuh di Yogyakarta, di mana pengunjung hanya berperan sebagai konsumen yang membeli barang.

Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional tidak sedikit. Menjadi pedagang di pasar tradisional merupakan alternatif pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran di Indonesia. Pasar tradisional biasanya terhubung dengan toko-toko kecil di dusun-dusun sebagai tempat kulakan. Pasar tradisional di pedesaan juga terhubung dengan pasar tradisional di perkotaan yang biasa menjadi sentral kulakan bagi pedagang pasar-pasar pedesaan di sekitarnya. Pasar tradisional merupakan penggerak ekonomi masyarakat.

---

<sup>5</sup> Utami Ayunita, *Eksistensi Pasar Tradisional di Kabupaten Sleman*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2011.

<sup>6</sup> Bromley mengklasifikasikan pasar menjadi tiga kelompok, yaitu pasar harian, pasar berkala, dan pasar khusus, yang masing-masing pasar mempunyai kegiatan jual-beli tersendiri Sadilah dkk. "*Eksistensi Pasar Tradisional Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah*". 2011. Kementerian Budaya dan Pariwisata. hal 1-2



Saat ini pasar tradisional tengah mengalami banyak tantangan. Ekspansi besar-besaran pasar modern di daerah-daerah telah menghadapkan para pedagang kecil pada persaingan terbuka yang keras. Saat ini jaringan peritel modern telah memukul mundur pasar tradisional. Peritel modern menguasai pasar hampir di seluruh daerah di Indonesia, mulai dari tingkat provinsi hingga dusun-dusun.

Persaingan menjadi tidak seimbang karena perbedaan modal antara pedagang di pasar tradisional dengan peritel modern. Modal para pedagang tradisional, umumnya berasal dari individu dan kecil. Sedangkan modal para peritel modern besar dan menggunakan sistem jejaring. Sistem jejaring inilah yang membuat para peritel modern kembali diuntungkan dari segi harga.

Selain modal dan jaringan, pasar tradisional juga kalah dari segi tempat. Sebagian besar pasar tradisional di Indonesia kumuh, penataannya kacau, berbeda dengan pasar modern yang memiliki tempat yang nyaman dan efisien. Toko yang ber-AC, barang-barang yang teratur rapi, tanpa ada proses tawar menawar dan menggunakan mesin di bagian kasir, menawarkan efisiensi dan kenyamanan bagi pembeli. Hal-hal semacam inilah yang tidak dimiliki oleh pasar tradisional.

Namun pasar tradisional juga memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan pasar modern. Kelebihan tersebut diantaranya adalah<sup>7</sup>:

1. Di pasar tradisional pembeli dapat melakukan tawar menawar harga dengan pedagang.
2. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau.
3. Secara budaya pasar tradisional merupakan tempat publik dimana terjadi interaksi sosial.

Dari banyak sisi, pasar tradisional tidak lebih baik dari pasar modern, apalagi karakter masyarakat saat ini lebih menyukai tempat belanja yang nyaman dan efisien dan hal inilah yang ditawarkan oleh pasar modern. Pasar tradisional tidak memiliki dua hal tersebut karena keterbatasan modal. Dan hal inilah yang harus dijembatani pemerintah. Kebijakan revitalisasi pasar adalah cara yang tepat untuk mengatasi ketimpangan ini.

---

<sup>7</sup> Tim Pengelola Pasar Kabupaten Bantul. "Konsep Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Bantul". 2010. Kantor Pengelolaan Pasar Bantul. Hal 3.

## D. Temuan Penelitian

### 1. Sejarah Munculnya Kebijakan Revitalisasi

Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Arin<sup>84</sup>, salah seorang staf di Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul. Wawancara dengan beliau selalu dilakukan pada pagi hari setelah beliau melaksanakan apel pagi, yaitu sekitar pukul 07.30. Pak Arin selalu menolak wawancara dimulai lebih siang dari itu, karena beliau harus melakukan pemantuan ke pasar-pasar.

Revitalisasi pasar tradisional di Bantul dimulai dari peristiwa gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi pada tahun 2006 adalah peristiwa yang melatar belakangi disusunnya kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Saat itu, Kabupaten Bantul merupakan salah satu yang mengalami kerusakan terparah. Salah satu bangunan yang mengalami kerusakan parah adalah pasar. Gempa bumi telah merusak bangunan fisik, memukul mental dan semangat masyarakat Bantul. Kerusakan fisik sejumlah bangunan dan sarana publik telah menyebabkan ekonomi lumpuh, dan pukulan mental karena gempa membuat masyarakat Bantul kehilangan harapan.

Kondisi tersebut membuat Drs. H.M. Idham Samawi, Bupati Bantul saat itu, mengambil keputusan untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional. Menurut beliau, jika pasar direvitalisasi maka kegiatan perekonomian akan bangkit. Masyarakat Bantul akan kembali bekerja dan dengan begitu mereka akan sedikit demi sedikit melupakan kesedihan karena gempa.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka dibentuklah dinas khusus yang mengatur dan mengelola pasar tradisional, yaitu KPP (Kantor Pengelolaan Pasar). KPP kemudian membuat rancangan program revitalisasi pasar tradisional, konsep dan mengatur mekanismenya.

Dasar hukum pembuatan kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a. PERDA Kabupaten Bantul nomor 5/2000 tentang retribusi pasar.
- b. PERDA Kabupaten Bantul nomor 17/2007 tentang

---

<sup>8</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 7 November 2012.

<sup>9</sup> Tim Pengelola Pasar Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul "Konsep Pengelolaan Pasar Tradisional Kabupaten Bantul Di Kabupaten Bantul" 2010 Hal.19

- pembentukan organisasi lembaga teknis daerah lingkungan Kabupaten Bantul.
- c. PERDA Kabupaten Bantul nomor 02/2008 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 5/2000 tentang retribusi pasar.
  - d. Peraturan bupati Bantul nomor 131a/2000 tentang petunjuk pelaksanaan perda nomor 5/2000 tentang retribusi pasar.
  - e. Peraturan Bupati Bantul nomor 08/2008 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pedagang pasar Kabupaten Bantul TA.2008

Bentuk dari kebijakan revitalisasi sendiri meliputi perbaikan fisik dan non fisik. Revitalisasi fisik adalah perbaikan bangunan pasar tradisional, penataan dagangan, pengelolaan kebersihan pasar tradisional. Sedangkan revitalisasi non fisik meliputi pemberdayaan pedagang pasar tradisional melalui pembentukan paguyuban pedagang tradisional, pemberian dana bergulir, pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar<sup>10</sup>.

## 2. Proses Revitalisasi Pasar Piyungan

Sejarah revitalisasi Pasar Piyungan diawali dengan proses relokasi pasar tersebut pada tahun 2010<sup>11</sup>. Saat proses revitalisasi pasar dilakukan, unsur-unsur lembaga seperti paguyuban pedagang pasar tradisional dan lurah pasar telah ada sehingga sosialisasi dilakukan oleh KPP (Kantor Pengelolaan Pasar) melalui ketua paguyuban dan lurah pasar.

Di lokasi pasar yang lama belum dilakukan penataan dagangan, sedangkan di lokasi yang baru, direncanakan dilakukan penataan dagangan. Oleh karena itu proses pertama yang dilakukan adalah pendataan jumlah pedagang di Pasar Piyungan dengan tujuan untuk mempermudah penempatan para pedagang ini di tempat yang baru. Kegiatan sosialisasi ini juga termasuk proses diskusi antara Tim Pengelolaan Pasar Tradisional dengan perwakilan pedagang dalam Paguyuban Pedagang Pasar Piyungan. Mengenai penataan barang dagangan dan penempatan kios dan lapak, diserahkan sepenuhnya

---

<sup>10</sup> Tim Pengelola Pasar Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul "Konsep Pengelolaan Pasar Tradisional Kabupaten Bantul Di Kabupaten Bantul" 2010 Hal.27-43

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anang, pedagang di Pasar Piyungan pada 20 November 2012

kepada kesepakatan internal para pedagang di Pasar Piyungan.

Saat ini Pasar Piyungan telah memiliki beberapa fasilitas penunjang yang sangat bagus untuk ukuran pasar tradisional yaitu: tempat pengelolaan sampah, klinik kesehatan, PAUD, dan ruang khusus rokok. Selain itu, lingkungan pasar juga bersih dan tertib karena pengelolaan parkirnya sangat baik.

### 3. Perbedaan Pasar Sebelum dan Sesudah di-Revitalisasi

Seperti telah dijelaskan di atas, Pasar Piyungan selain mengalami revitalisasi juga telah direlokasi. Setelah relokasi dilakukan, proses revitalisasi juga terus berjalan. Revitalisasi pasca relokasi lebih bersifat pada pengelolaan pasar dan pemberdayaan pedagang pasar. Agar lebih mudah untuk menjelaskan perbedaan pasar sebelum dan sesudah revitalisasi, peneliti membuat beberapa poin bidang yang menjadi sasaran revitalisasi:

#### a. Penataan Dagangan

Di Pasar Piyungan, terdapat dua jenis tempat untuk pedagang yaitu kios dan lapak. Kios dan lapak ini dibagi lagi ke dalam berbagai jenis berdasarkan barang yang dijual. Untuk kios diantaranya ada: kelontong, pupuk dan alat-alat peternakan, warung makan, pakaian, tas, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk lapak diantaranya: kelontong, sayur-mayur, buah-buahan, bumbu-bumbu, peralatan rumah tangga, daging, jajanan pasar, hasil bumi seperti singkong, ubi, dan lain sebagainya. Selanjutnya pasar ditata dengan cara membuat blok-blok. Setiap blok menjual satu jenis dagangan. Misalnya blok L adalah tempat untuk para pedagang yang menjual jajanan pasar, dan blok D adalah tempat yang menyediakan ikan segar.

Dengan penataan semacam ini, memudahkan para pembeli dalam berbelanja. Selain lebih efisien waktu bagi para pembeli juga membuat pasar menjadi lebih rapi dan teratur, karena tidak ada pedangan musiman yang membuka lapak sembarangan di tempat yang tidak sesuai dengan jenis dagangan pada tiap blok. Namun dampak negative penataan ini bagi pedagang adalah kompetisi antar pedagang dalam satu blok menjadi sangat kuat dan ini berpengaruh terhadap

omset.

b. Kebersihan dan Kesehatan Pasar

Lokasi pasar sebelum direlokasi berada di sebuah lahan tanpa lantai permanen. Jika hujan menjadi becek, kotor, sehingga tidak nyaman. Di lokasi yang baru, bangunan pasar di design seperti ruko di bagian tengah. Disekelilingnya terdapat beberapa fasilitas pendukung seperti klinik, masjid, dan PAUD<sup>12</sup>, TPA<sup>13</sup>, dan lahan parkir. Dengan design lokasi yang seperti ini serta penataan dagangan yang dilakukan, memudahkan pengelola Pasar Piyungan dalam mengelola kebersihan. Pedagang pasar sendiri telah membayar retribusi kebersihan per hari untuk sampah.

Khusus di Pasar Piyungan, terdapat kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Karang Taruna setempat<sup>14</sup>. Tempat pengolahan sampah ini bernama "Taruna Hayati" dan memfokuskan pada pengolahan sampah menjadi kompos.

Pada dasarnya konsep pengelola Pasar Piyungan dalam hal menjaga kebersihan pasar, relatif sama dengan yang dahulu yaitu menarik retribusi kebersihan dari para pedagang untuk membayar petugas kebersihan. Namun dengan adanya Program Pengolahan Sampah yang dikelola oleh Karang Taruna setempat, telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kebersihan pasar. Sampah-sampah diangkut dan dikumpulkan di TPA sehingga tidak tercecer. Sistem pengambilan sampah di tiap tempat sampah di tiap blok juga diatur sehingga jika pembeli berkeliling di blok-blok di pasar tidak akan terganggu dengan ceceran dan bau sampah. Selain itu, penataan dagangan yang dilakukan juga membuat lingkungan pasar teratur. Kondisi yang demikian membuat pasar bersih sekaligus lebih sehat.

c. Layanan Sosial

Di Pasar Piyungan juga terdapat layanan atau fasilitas umum. Beberapa diantaranya telah peneliti

---

<sup>12</sup> Pendidikan Anak Usia Dini

<sup>13</sup> Tempat Pembuangan Akhir.

<sup>14</sup> Berdasarkan Observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pasar Piyungan pada tanggal 28 September 2012

sebutkan di awal. Yang pertama adalah klinik pengobatan. Lokasi klinik berada tepat disamping PAUD dan masjid pasar. Setiap harinya ada dokter jaga, namun hanya sampai jam satu siang saja<sup>15</sup>. Yang kedua, terdapat ruangan khusus merokok yang terletak di lantai dua bangunan pasar. Layanan umum lainnya yaitu PAUD. PAUD ini digunakan pula oleh para ibu-ibu yang sekaligus pedagang untuk menitipkan anak mereka saat mereka sibuk berjualan<sup>16</sup>. Dan yang terakhir adalah tempat pengolahan sampah “Taruna Hayati” yang dikelola oleh Karang Taruna setempat.

Demikian beberapa layanan atau fasilitas umum yang terdapat di Pasar Piyungan yang dirasakan sendiri oleh pedagang sangat bermanfaat. Namun, masih terdapat kendala dalam pemanfaatannya. Misalnya ruang khusus perokok belum digunakan secara maksimal, masih banyak pedagang dan pekerja pasar yang belum tertib dalam hal merokok.

d. Program Dampungan

Tim Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul memiliki program pendampungan bagi para pedagang pasar tradisional, yaitu berupa pemberian dana bergulir. Program ini ditujukan untuk membantu para pedagang dalam hal penambahan modal. Selain itu, program ini juga dimaksudkan agar para pedagang tidak terjebak meminjam uang kepada rentenir.

Syarat untuk mengajukan dana bergulir ini sangat mudah. Pedagang hanya perlu mengajukan permohonan dengan hanya dilampiri fotocopy KTP saja. Bunga yang diterapkan juga kecil, hanya sebesar 2% yang langsung diambil saat pencairan dana. Pengajuan pinjaman maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00. Pelaksanaan penagihan dilakukan oleh petugas dengan cara mendatangi tempat berjualan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Anang, pedagang Pasar Piyungan dilakukan pada tanggal 28 September 2012

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bu Siti pedagang di Pasar Piyungan dilakukan pada tanggal 28 September 2012

<sup>17</sup> Tim Pengelola Pasar Kabupaten Bantul. “Konsep Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Bantul”. 2010. Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul. Hal 39

Menurut pengakuan Ibu Siti<sup>18</sup> program ini sangat dirasakan manfaatnya karena dapat menjadi solusi untuk melakukan pinjaman, bukan kepada rentenir. Bunga yang diberikan kecil, dan jangka waktu angsurannya juga panjang yaitu selama 100hari. Selain itu, kredit dapat dicairkan setiap saat dan bila telah melunasi kreditnya, pedagang dapat mengajukan pinjaman kembali.

Program dampingan yang lain adalah pengolahan sampah. Pengolahan sampah di Pasar Piyungan dikelola oleh Karang Taruna setempat dan diberi nama "Taruna Hayati". Taruna Hayati memfokuskan diri pada pengolahan sampah menjadi kompos<sup>19</sup>.

#### 4. Dampak Revitalisasi Bagi Pedagang

Untuk mengetahui dampak revitalisasi Pasar Piyungan terhadap pedagang, peneliti melakukan wawancara dengan dua orang pedagang<sup>20</sup>, yaitu:

1. Bapak Anang, 30 tahun. Pedagang pupuk dan kelontong yang menempati sebuah kios.

Bapak Anang tinggal di dekat Pasar Piyungan. Jarak tempat tinggalnya dengan pasar kurang lebih 15 menit waktu perjalanan dengan menggunakan motor. Beliau sudah lima tahun menjadi pedagang di Pasar Piyungan. Jadi beliau mengetahui dan mengalami sejarah Perubahan pasar sebelum dan setelah pasar direvitalisasi.

Saat wawancara, beliau dengan semangat menceritakan kondisi pasar sewaktu belum direvitalisasi. Menurut Beliau, sebelum direvitalisasi Pasar Piyungan berdiri di tanah yang satu kali lebih sempit dibandingkan dengan yang sekarang. Bangunannya juga tidak permanen. Lantainya masih tanah, sehingga bila hujan pasar akan becek. Di pasar lama, Pak Anang juga menempati kios dan berjualan peralatan pertanian dan kelontong. Selama kurang lebih tiga tahun berjualan, Pak Anang mengaku telah

---

<sup>18</sup> Pedagang di Pasar Piyungan

<sup>19</sup> Sampai waktu penelitian berakhir, peneliti belum berhasil menemui pengelola "Taruna Hayati" untuk meminta informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah di Pasar Piyungan.

<sup>20</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 28 September 2012

memiliki cukup banyak pelanggan.

Di pasar lama, tidak ada pembagian blok dan penataan dagangan. Pengaturan parkir juga tidak ada. Memang cenderung berantakan. Namun Pak Anang menuturkan, itu semua tidak masalah bagi pedagang asal mereka memiliki banyak pelanggan dan pasar tetap ramai. Sampai akhirnya muncul rencana relokasi pasar oleh Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.

Pak Anang mengaku seluruh pedagang di pasar diberikan sosialisasi sebelumnya mengenai rencana itu. Pedagang diminta tanda tangan sebagai bukti persetujuan. Pedagang kemudian didata jumlahnya, dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu yang menempati kios dan yang menempati lapak. Pendataan ini dilakukan oleh Paguyuban Pedagang Pasar. Pak Anang sendiri saat itu berharap dengan direlokasi kondisi pasar akan lebih baik sehingga makin ramai dan dirinya dapat memperoleh pelanggan baru.

Tapi tidak semua harapan Pak Anang terwujud setelah relokasi dilakukan. Secara fisik Pasar Piyungan mengalami perubahan yang lebih baik. Bangunan pasar adalah bangunan permanen, lantainya juga bukan lagi tanah, punya atap, sehingga tidak khawatir becek jika musim hujan tiba. Fasilitas penunjang juga lengkap dibanding pasar tradisional lain. Bahkan saat ini telah dilakukan penataan dagangan dan penataan parkir juga telah dilakukan. Dua hal ini membuat pasar semakin terlihat rapih dan berkesan modern karena semuanya menjadi lebih teratur. Bahkan, Menteri Perdagangan pernah mengunjungi pasar ini. Namun dampak negatifnya ada juga pasca relokasi, menurut Pak Anang. *Pertama*, beliau kehilangan kontak dengan pelanggan-pelanggannya di pasar lama. Setelah pasar dipindah, pelanggannya kesulitan untuk mencari tokonya. Beberapa akhirnya bertemu lagi dengan dirinya dan tetap jadi langganan hingga saat ini, dan beberapa lagi tidak. *Kedua*, pengaturan parkir juga menjadi masalah tersendiri bagi pedagang. Retribusi parkir sebesar Rp. 1.000,00 per sekali masuk menurut beliau memberatkan calon pembeli. Di pasar



lama, calon pembeli bebas keluar masuk pasar kapan saja tanpa harus membayar parkir. "Sekarang, sekali masuk saja sudah dimintasi uang seribu rupiah. Coba bayangkan mbak, kalau ada yang mau bolak-balik. Dua kali saja sudah dua ribu." Pak Anang bertutur dengan nada gemas. Menurutnya, hal ini berpotensi untuk mengurangi calon pembeli.

Selanjutnya Pak Anang makin berapi-api. Beliau menuturkan, lokasi pasar yang baru juga tidak lebih strategis dari pasar yang lama. Beliau mengaku pasar saat ini lebih sepi dibanding di tempat yang lama. Dulu di pasar yang lama, beliau biasa menutup kiosnya pada pukul tiga sore, tepat saat ashar. "Sekarang mbak di sini, jam 12.00 *aja udah* sepi. Mbak liat sendiri ini *udah* banyak yang tutup".<sup>21</sup> Beliau mengaku semenjak direlokasi, omsetnya menurun. Namun beliau menolak ketika dimintai keterangan terkait nominal omset. "yang jelas, lebih ramai di tempat yang dulu mbak", begitu tuturnya.

Terakhir beliau mengeluhkan lokasi pasar saat ini berada di dekat sebuah sekolah menengah. Menurut beliau kurang pantas pasar berdekatan dengan sekolah. Alasannya adalah karena sikap dan kebiasaan para pekerja di pasar berbeda dengan sikap yang ditanamkan di sekolah. Pak Anang mengungkapkan ini dengan sungguh-sungguh. Hal ini agak mengagetkan, karena dari penampilannya beliau terlihat sangat *cuek* dan semaunya sendiri tapi ternyata sangat peduli pada lingkungan sekitar dan pendidikan.

2. Ibu Siti, 29 tahun. Pedagang bumbu yang menempati sebuah lapak di bagian dalam di Pasar Piyungan.

Ibu Siti sangat ramah, namun beliau sedikit pemalu.<sup>22</sup> Saat tahu peneliti adalah mahasiswa, sepertinya beliau sedikit tidak nyaman. Namun wawancara berjalan dengan baik, dan dilakukan ditengah-tengah Bu Siti membereskan lapak sambil mengobrol dengan padagang lain.

Berbeda dengan Pak Anang, Bu Siti lebih banyak

---

<sup>21</sup> Wawancara ini dilakukan setelah waktu sholat dhuhur, sekitar pukul 13.00 WIB

<sup>22</sup> Tidak seperti Pak Anang, Bu Siti menolak untuk difoto saat wawancara dilakukan.

bercerita mengenai program dana bergulir. Beliau menuturkan program itu sangat bermanfaat bagi dirinya, terutama program kredit. Program tersebut dapat menjadi solusi saat dirinya mengalami kesulitan modal dan kebutuhan darurat. Selain itu angsurannya juga ringan dan jangka waktunya panjang, tapi bunganya kecil dan dipotong langsung di awal.

Bu Siti ternyata bukan warga asli Piyungan, melainkan berasal dari Sleman. Saat wawancara dilakukan beliau juga bercerita banyak pedagang di Pasar Piyungan yang berasal dari Sleman. Pedagang-pedagang di sekitar lapak Bu Siti, yang sebagian besar wanita, juga berasal dari Sleman. Mereka berangkat dari Sleman sekitar pukul 6 pagi, setelah menyiapkan keperluan anak dan suami. Bu Siti sendiri memiliki dua orang anak, satu putrid dan satu putra. Beliau biasa bangun pukul tiga pagi setiap harinya, untuk memasak dan menyiapkan keperluan keluarganya yang lain agar pukul enam pagi beliau bisa berangkat berjualan ke pasar.

Bu Siti bukan pedagang baru, beliau telah menjadi pedagang di Pasar Piyungan sebelum direlokasi. Beliau mengaku tidak banyak kehilangan pelanggan setelah direlokasi. Namun beliau mengeluhkan pengelompokan dagangan membuatnya mendapat saingan baru. *"sebelah Saya ini juga jual bumbu to mbak. Jadi kadang kalau yang bukan langganan ya dia bingung mau beli di tempat yang mana"*, begitu pengakuan Bu Siti. Menurut beliau untuk mengantisipasi kompetisi ini, tiap pedagang harus punya pelanggan.

Selain itu, Bu Siti juga mengeluhkan banyaknya retribusi yang dibebankan kepada pedagang. Retribusi keamanan, kebersihan, serta dari paguyuban pedagang pasar. Menurutnya, jika diakumulasikan jumlah pengeluaran untuk retribusi sebanding dengan separuh keuntungannya berjualan selama sebulan. Tapi Bu Siti mengaku lebih nyaman menempati pasar hasil relokasi karena lebih bersih dan lebih teratur. Selain itu juga memiliki fasilitas penunjang seperti klinik dan PAUD yang dapat dimanfaatkan untuk tempat menitipkakan anak.

## **E. Kesimpulan dan Saran**

Pemerintah Kabupaten Bantul telah membuktikan dukungannya kepada pasar tradisional melalui kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi yang dilakukan tidak hanya pada fisik bangunan, tapi juga pengelolaan pasar tradisional dengan cara-cara yang lebih modern.

Pasar Piyungan merupakan salah satu contoh pasar tradisional yang telah direvitalisasi dengan baik oleh Pemkab Bantul. Pasar Piyungan tidak hanya direvitalisasi secara fisik, tapi juga dikelola dengan tata kelola yang baru dan modern. Terbukti dengan adanya beberapa fasilitas penunjuang berupa layanan umum dan program pendampingan. Namun khusus untuk kasus Piyungan, perlu diperhatikan keluhan para pedagang pasca relokasi pasar mengenai sepiunya pengunjung dan menurunnya omset.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Izzudin, *Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Tradisional di Bantul (Analisis dari Perspektif Pengembangan Masyarakat)*, Skripsi, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Penataan Toko Modern Di Kabupaten Bantul.
- Sadilah, Emiliana dkk., *Eksistensi Pasar Tradisional Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Yogyakarta, 2011.
- Sumintarsih, dkk., *Eksistensi Pasar Tradisional Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya, Jawa Timur*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Yogyakarta, 2011.
- Tim Pengelola Pasar Kabupaten Bantul, *Konsep Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Bantul*, Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul, Bantul, 2010.
- Utami Ayunita, *Eksistensi Pasar Tradisional di Kabupaten Sleman*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

# KEBIJAKAN PEMKAB BANTUL DALAM MENANGANI MENJAMURNYA TOKO MODERN

Tatik Setyorini<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Munculnya banyak toko modern memberikan manfaat bagi penambahan retribusi daerah dan kemudahan bertransaksi masyarakat, namun di sisi lain pertumbuhan toko modern yang semakin sporadis hingga ke pelosok desa menjadi momok bagi sebagian pihak akan timbulnya persaingan yang tidak seimbang. Kondisi tersebut mampu melumpuhkan pedagang dengan modal kecil (pedagang kelontong) lewat mekanisme banting harga yang sering ditawarkan toko modern. Munculnya semangat dan kebijakan Pemkab Bantul dalam mengatur toko modern perlu diapresiasi dan mendapat evaluasi sehingga kemunculan toko modern tidak menjadi momok yang mengerikan bagi perekonomian rakyat kecil.*

*Kata Kunci:* Toko Modern, Pedagang Modal Kecil, Mekanisme Banting Harga, Kebijakan Pemerintah.

---

## **A. Latar Belakang**

Kehidupan saat ini nyaris tidak dapat dilepaskan dari pasar. Pasar menyediakan berbagai barang kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Pengelolaan pasar mulanya hanya dilakukan dengan sistem manual yang sangat sederhana, namun saat ini telah menggunakan sistem teknologi dan informasi yang semakin canggih serta dikelola dengan manajemen modern. Mulanya sistem transaksi di pasar dilakukan dengan sistem tawar menawar yang membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan barang dengan harga yang sesuai. Namun dengan munculnya toko modern, tidak perlu

<sup>1</sup> Tatik Setyorini merupakan mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga.

lagi tawar menawar, harga sudah tertera pada label harga yang tercantum pada bar code dan informasi mengenai produk sudah tersedia melalui mesin pembaca.<sup>2</sup>

Pada awalnya keberadaan toko modern hanya berada di perkotaan, sebab masyarakat kota identik dengan masyarakat yang bergulat dengan kesibukan, sehingga munculnya toko modern sangatlah membantu mereka untuk mendapatkan barang dengan mudah dan cepat. Masalah mulai muncul, ketika pasar modern mulai bergerak bebas tidak lagi terfokus di kota-kota besar, namun sudah menerobos sampai ke pelosok-pelosok. Ditambah lagi dengan minimnya peraturan terkait pengendalian toko modern yang jelas dan tegas dari pemangku kebijakan. Hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan semakin tersudutnya keberadaan usaha ekonomi kecil, termasuk pasar tradisional dan toko kelontong. Mengutip data Bank Pembangunan Asia (ADB) yang dirilis oleh *antaranews.com*, memperkirakan bahwa jumlah pasar tradisional menurun sebesar 8,1 persen sepanjang 2011. Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan pasar modern yang tumbuh 31,4 persen pada periode yang sama.<sup>3</sup>

Menurut data Nielsen, seperti yang dirilis *bisnis.com* dan telah dikutip oleh Hasanah menyatakan bahwa kontribusi penjualan pasar tradisional terus mengalami kemerosotan pasca munculnya *mall* di Indonesia. Jika pada tahun 2002 segmen pasar modern mendominasi penjualan sebesar 75%, maka di tahun lalu turun menjadi 70%. Kemunculan mall dan ritel modern yang semakin pesat berbanding terbalik dengan

<sup>2</sup> Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. Sedangkan, Toko Modern adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hipermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan* pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Sedangkan toko modern adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hipermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008, *tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern*, hal 3.

<sup>3</sup> [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), diakses pada 31 Juli 2012.

tingkat pertumbuhan pasar tradisional. Sekitar delapan persen dari total 13 ribu pasar tradisional di Indonesia terpaksa tutup. Tanpa adanya kemauan dan keberpihakan dalam upaya memberdayakan pasar tradisional, maka diprediksikan selama delapan tahun ke depan seluruh pasar tradisional di Indonesia hanya tinggal hitungan jari.<sup>4</sup>

Di satu sisi, makin meluasnya pendirian pasar modern di Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi serta iklim usaha yang baik, namun disisi lain perkembangan pasar modern menjadikan pasar tradisional menjadi korban dari adanya kompetisi sengit antara sesama pasar modern, baik lokal maupun asing. Pasar tradisional dikhawatirkan akan kehilangan pelanggan akibat praktik usaha yang dilakukan oleh supermarket.<sup>5</sup> Oleh karena itu dengan adanya dampak negatif akibat munculnya pasar modern, maka diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang mengatur keberadaan pasar modern sehingga toko modern, pasar tradisional, dan usaha ekonomi kecil mampu tumbuh secara seimbang, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling memperkuat satu sama lain.

Salah satu kabupaten yang cukup baik dalam mengatur keberadaan ritel modern adalah Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha melindungi pedagang pasar tradisional dengan melarang pendirian mal dan pembatasan toko modern di Bantul. Kebijakan ini, disatu sisi merupakan proteksi untuk melindungi usaha kecil, toko kelontong dan pasar tradisional, namun kebijakan ini juga menimbulkan dilema, khususnya bagi ritel lokal karena pembatasan pendirian toko modern menghalangi perubahan toko kelontong menjadi toko modern. Tulisan ini difokuskan untuk melihat kebijakan dari Pemkab Bantul terkait pengaturan tentang pasar; Apakah saja bentuk kebijakan Pemkab Bantul tersebut? Apakah kebijakan tersebut mampu memberi *positif effect* bagi pelaku ekonomi kecil dan toko kelontong?

---

<sup>4</sup> Novi Hasanah, "Dampak Kehadiran Plaza Ambarukmo Terhadap Aktivitas Jual Beli Di Pasar Tradisional Gowok Yogyakarta", 2009, hlm. 5.

<sup>5</sup> Paesoro, Adri. 2007. *Pasar Tradisional di Era Persaingan Global*, hlm. 5. <http://www.smeru.or.id> [ diakses, 14 September 2012].

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang pasar. Penelitian tersebut antara lain:

- Nahdliyyul Izza (2010), *Pengaruh Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta)*. Fokus kajiannya adalah pengaruh Ambarukmo Plaza terhadap perekonomian pedagang pasar tradisional desa caturtunggal dan kecenderungan masyarakat memilih pasar modern. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah dalam teori dikatakan bahwa, jika terdapat pasar besar (modal besar), maka akan mematikan pasar kecil sehingga mengakibatkan para pedagang kehilangan pendapatannya. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa tidak semuanya pasar besar mengalahkan pasar kecil. Keadaan tersebut telah dibuktikan dalam penelitian penulis di Pasar Desa Caturtunggal bahwa adanya pasar besar (Ambarukmo Plaza) membawa pengaruh yang bervariasi baik positif, negative maupun yang biasa-biasa saja (netral).<sup>6</sup>
- Ahmad Izzudin (2012) meneliti tentang *Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Tradisional di Bantul (Analisis dari Perspektif Pengembangan Masyarakat)*. Fokus kajiannya adalah tentang kebijakan pemerintah terhadap pasar tradisional dengan perbandingan analisis dari perspektif pengembangan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah mengenai pasar tradisional yang terdapat di Bantul, yaitu: *Pertama*, perkembangan masalah ekonomi masih didominasi dengan paham atau ideologi dunia. *Kedua*, konsep neoliberalisme seperti kemunculan pasar modern saat ini, telah

---

<sup>6</sup> Nahdliyyul Izza, "Pengaruh Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta", 2010.



merambah hingga tingkat desa. *Ketiga*, instrument kebijakan pasar seperti kantor pasar yang digunakan sebagai pengatur dan pengelola pasar itu sendiri masih identik dengan pasar bebas. Oleh karena itu, maka Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan konsep regulasi kebijakan pasar yang memperhatikan kondisi sosial ekonomi dalam pengembangan masyarakat setempat sehingga konsep ekonomi yang seimbang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian.<sup>7</sup>

## 2. Landasan Teori

### Kebijakan Pemerintah

Istilah kebijakan diidentikkan dengan kata dalam bahasa Inggris '*policy*'. Kebijakan adalah prinsip-prinsip atau cara bertindak yang dipilih guna mengarahkan pada tindakan pengambilan keputusan. Kebijakan juga bisa diartikan sebagai suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang diproses secara terencana dan konsisten sebagai upaya pencapaian tujuan tertentu.<sup>8</sup>

Menurut Ealau dan Prewitt (1973) dan Titmuss (1974) yang dikutip oleh Suharto, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dengan dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik bagi pihak yang membuat maupun pihak yang mentaatinya. Selanjutnya, kebijakan juga didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan untuk diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu.<sup>9</sup> Kebijakan akan melahirkan pokok bahasan dalam implementasi kerja nyata bagi masyarakat yang mengarah pada satu tujuan bersama yakni pengelolaan pemerintah yang baik. Namun demikian, kebijakan dapat juga melahirkan ketidakadilan.<sup>10</sup>

Adam, Hauff dan John (2002) dikutip oleh Suharto,

---

<sup>7</sup>Ahmad Izzudin, "*Kebijakan Pemerintah tentangn Pasar Tradisional di Bantul (Analisis dari Perspektif Pengembangan Masyarakat)*", 2012, hlm. 175-178.

<sup>8</sup>Edi Suharto, "*Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*", 2010, hlm. 7.

<sup>9</sup>Ibid.,

<sup>10</sup>Ahmad Izzudin, "*Kebijakan Pemerintah tentangn Pasar Tradisional di Bantul (Analisis dari Perspektif Pengembangan Masyarakat)*", 2012.

menyatakan bahwa negara merupakan aktor utama yang punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan untuk menjalankan perlindungan sosial, khususnya menyangkut skema jaminan social (jaminan social dan asuransi sosial) dan kebijakan pasar kerja. Kebijakan jaminan sosial yang diberikan negara, baik yang diterapkan negara maju maupun berkembang dapat berupa:<sup>11</sup>

1. Memberikan kontribusi penting terhadap pencapaian tujuan ideal bangsa, berupa keadilan sosial dan kebebasan individu. Sehingga keadaan tersebut dapat mendukung kedamaian dan keamanan sosial.
2. Mampu mencegah atau memberi kompensasi terhadap dampak-dampak negatif yang timbul dari produksi ekonomi swasta, seperti perusahaan bisnis dan asuransi swasta.
3. Menciptakan modal manusia (*human capital*) dan pra-kondisi untuk melakukan penguatan produktivitas ekonomi mikro dan makro. Oleh karena itu, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan (Adam, Hauff, dan John, 2002:18).

## C. Temuan Penelitian

### 1. Potret Pasar di Bantul

Untuk mengetahui dampak dari persaingan pasar di Bantul penelitian ini fokus untuk mengkaji kondisi pedagang di sepanjang jalan di sekitar Rumah Sakit Panembahan Senopati, Kabupaten Bantul. Di sepanjang jalan rumah sakit terdapat toko-toko yang menjajakan barang dagangan mereka. Di sebelah kanan rumah sakit, kurang lebih 100 m, terdapat toko modern Indomaret, sedangkan di depannya terdapat dua toko milik masyarakat sekitar yang saling berdekatan.<sup>12</sup> Bergeser ke

---

<sup>11</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 155-156.

<sup>12</sup> Toko pertama menjajakan barang-barang kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, mainan anak, dan sembako. Toko pertama ini memiliki lebih dari dua pegawai. Sedangkan toko kedua yang terletak disebelahnya yang dipisahkan oleh tembok, menjual berbagai mainan anak, baju, kerudung,

sebelah kanan kedua toko tersebut, kira-kira 100 meter, terdapat toko kelontong yang berada di dalam area bangunan rumah si pemilik toko. Penjual toko kelontong tersebut adalah seorang ibu, yang sekaligus pemilik bangunan rumah dan toko tempatnya berjualan. Kurang lebih 500 meter dari Rumah Sakit Panembahan Senopati terdapat toko modern yang lebih besar, yaitu Toko Mulia. Toko Mulia merupakan toko yang menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari masyarakat yang belum begitu lama buka di Bantul. Ibu Soerjono menuturkan “Pemilik Toko Mulia itu bukan orang lokal kok mbak” ujar.<sup>13</sup>

## 2. Dampak Persaingan Toko

Beberapa pedagang toko kelontong yang menjajakan dagangan di depan RSPanembahan Senopati mengeluhkan dengan semakin sulitnya untuk mendapatkan keuntungan dari berdagang. Bahkan beberapa di antaranya mengalami gulung tikar.

*“Dulu saya bisa menerima omset per-hari dari berdagang kelontong ini sampai satu juta, namun saat ini sulit paling pol empat ratus sampai lima ratus ribu rupiah per-hari.*

*Sudah banyak pedagang kelontong yang berada di sebelah saya yang gulung tikar, karena ndak dapat keuntungan. Kebanyakan mereka kan bukan orang asli sini (Bantul) jadi mereka berusaha menjajakan dagangan mereka di tempat lain”.*<sup>14</sup>

Menurut penuturan Ibu Soerjono dan Mbak Tari, munculnya toko modern yang berstatus waralaba Indomaret tidak terlalu berpengaruh buruk terhadap toko kelontongnya. Meskipun kemunculan toko tersebut mempengaruhi penjualan, namun pengaruh Indomaret tidak sebesar pengaruh Toko Mulia.

*“Keberadaan Indomaret sebenarnya ndak terlalu berpengaruh dengan penurunan omset dan pelanggan kami, justru toko mulia yang menjadi pengaruh bagi toko kelontong seperti kami”.*

*“Ndak papa sih sebenarnya dengan keberadaan Indomaret, tapi kalo pembeli yang akan beli disini tapi ndak ada, mereka*

---

aksesoris, toko ini juga dijaga dua orang pegawai.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Pedagang Toko Kelontong (Ibu Soerjono) di depan Rumah Sakit Panembahan Senopati, pada tanggal 7 Oktober 2012.

<sup>14</sup> Ibid.,

*lalu lebih memilih ke toko mulia yang lebih komplit” .<sup>15</sup>*

Setelah berdirinya Toko Mulia, Ibu Soerjono mengaku bahwa banyak pembelinya yang beralih untuk berbelanja di toko mulia tersebut. Alasannya, pembeli lebih tertarik dengan pelayanan yang diberikan toko mulia dan harga di Toko Mulia sedikit lebih murah dengan harga di tokonya. Dengan selisih harga yang kecil para konsumen sudah pada pindah. Toko Mulia juga sering mengadakan diskon atau sale yang menarik konsumen lebih banyak. Sebagai toko dengan modal kecil, toko Ibu Soerjono, tidak mungkin memberikan diskon-diskon atau harga semurah toko saingannya, yang punya modal lebih besar. Selain itu, pelayanan yang canggih, bersih, barang yang komplit, dan penawaran menarik yang disuguhkan oleh toko modern mampu membuat orang beralih untuk memilihnya.<sup>16</sup>

Toko modern yang bisa menyuguhkan barang-barang kebutuhan yang lengkap dan selalu memberikan inovasi *sale* membuatnya diminati banyak konsumen. Jika para konsumen lebih tertarik dengan toko modern yang lebih bisa memberikan pelayanan yang prima, maka toko kelontong akan semakin sepi oleh konsumen. Keadaan tersebut berdampak pada keberlangsungan toko kelontong.

### **3. Kebijakan Pemerintah Bantul dalam Menangani Menjamurnya Ritel Modern**

Semakin menjamurnya ritel-ritel modern, yang awalnya hanya terkonsentrasi hanya di kota-kota besar kini telah merambah hingga pelosok desa. Keadaan ini dikhawatirkan akan semakin menyudutkan keberadaan toko kelontong sebagai bentuk usaha masyarakat lokal, akibat persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan pemerintah.

*“Kebijakan Pemerintah Bantul terkait penataan toko modern guna melindungi pasar tradisional dan pedagang kelontong agar tidak mati (jika pedagang kecil mati maka akan menimbulkan masalah baru yaitu pengangguran) mengarah pada pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat”*

*“Kebijakan tersebut terwujud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan*

---

<sup>15</sup> Ibid.,

<sup>16</sup> Ibid.,

*pasar dan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2011.*"<sup>17</sup>

Untuk mengantisipasi persaingan yang tidak seimbang antar pedagang di Bantul maka Pemkab Bantul mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pasar dan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2011. Implementasi dari kebijakan yang telah dicetuskan oleh pemerintah Kabupaten Bantul diwujudkan dengan malakukan rehab pada bangunan pasar tradisional di Kabupaten Bantul.<sup>18</sup> Selain itu, juga melakukan penataan toko atau ritel modern. Penataan tersebut berupa peraturan lokasi dan jarak pendirian bagi ritel modern yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010.

Jarak pendirian toko modern yang ditetapkan Kabupaten Bantul meliputi:<sup>19</sup>

1. Jarak pendirian minimarket dengan pasar tradisional minimal 3.000 meter.
2. Jarak pendirian supermarket dan department store dengan pasar tradisional minimal 3.000 meter.
3. Jarak pendirian hypermarket dan perkulakan dengan pasar tradisional minimal 5.000 meter.

Peraturan tersebut telah melindungi pasar tradisional, namun belum mengatur persaingan antar toko. Selain itu dalam pasal 2, ayat 2, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar, menyatakan bahwa:

1. *Memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional.*
2. *Memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan.*
3. *Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko kodern*

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan (Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Kabupaten Bantul) pada 14 Agustus 2012 dan 7 November 2012.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Bantul, pada 14 Agustus 2012.

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar, hlm. 11.

*disuatu wilayah tertentu agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan.*

4. *Menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.*
5. *Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan public serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.*
6. *Mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisiensi, dan berkelanjutan.<sup>20</sup>*

#### **4. Dampak/Manfaat**

Adanya peraturan daerah yang mengatur terkait menjamurnya ritel modern di Kabupaten Bantul diterima baik oleh pedagang toko kelontong, sebab aturan tersebut diharapkan bisa melindungi usaha-usaha kecil-menengah di tengah menjamurnya ritel modern. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Soerjono:

*“Kalo ada kebijakan pemerintah tentang penataan toko modern, yo bagus to mbak. Aku setuju, karena orang-orang kayak kami (pedagang kelontong) bisa terlindungi”<sup>21</sup>*

Perhatian yang diberikan Pemerintah Bantul dalam bentuk kebijakan penataan toko modern, sangat tepat dilakukan guna melindungi usaha mikro. Kebijakan pemerintah terkait penataan toko modern, merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam melindungi pedagang-pedagang atau industry lokal dari ancaman ritel modern, sehingga munculnya kebijakan pemerintah tersebut disambut baik oleh warga,

---

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 *tentang Pengelolaan Pasar*, hlm. 4-5.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Pedagang Toko Kelontong Depan Rumah Sakit Panembahan Senopati, pada 7 Oktober 2012.

khususnya pedagang toko kelontong.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani ancaman manjamurnya ritel modern memiliki tujuan, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010, yaitu:

1. Memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional.
2. Memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisioanal pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya
3. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern disatu wilayah tertentu agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan.
4. Menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan.
5. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan public serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional. pusat perbelanjaan dan toko modern
6. Mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

#### **D. Kesimpulan**

Keberadaan toko modern bagaikan keping mata uang yang saling berlawanan, disatu sisi memberikan keuntungan, namun disisi lain justru menimbulkan kerugian. Namun demikian, keberadaan toko atau ritel modern tidak selamanya memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil- menengah. Namun demikian kemunculan ritel

modern yang semakin menjamur menjadi suatu kekhawatiran bagi usaha kecil-menengah. Pelayanan dan system yang berbeda antara pasar tradisional dan toko modern menjadi pengaruh bagi minat konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya sikap atau langkah yang jelas dan nyata dalam menangani masalah menjamurnya ritel modern.

Kebijakan Pemkab Bantul dalam menangani menjamurnya ritel modern merupakan suatu langkah yang luar biasa. Namun demikian, masih terdapat saran yang ingin saya berikan guna perbaikan kebijakan pemerintah ke depan. Ketika saya mengamati implementasi kebijakan terkait ancaman ritel modern di Kabupaten Bantul ternyata masih ada yang merasakan betapa sulitnya mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan, khususnya bagi pelaku pedagang kelontong. Implementasi kebijakan terkait ancaman ritel modern di Bantul lebih terkonsentrasi pada revitalisasi pasar tradisional dan penataan lokasi dan jarak toko modern. Perhatian pada toko kelontong masih minim dilakukan, dan penanganan fisik lebih mendominasi implementasi kebijakan. Oleh karena itu, Pemerintah Bantul perlu memberikan pendampingan bagi toko kelontong berupa pelatihan pengelolaan usaha supaya mereka dapat bertahan dari permainan harga dan strategi-strategi lainnya dalam situasi menjamurnya ritel modern.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adri Paesoro, *Pasar Tradisional di Era Persaingan Global*. <http://www.Smeru.or.id>, 2007, diakses pada 14 September 2012.
- Ahmad Izzudin, *Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Tradisional di Bantul (Analisis dari Perspektif Pengembangan Masyarakat)*, Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- <http://www.antaranews.com>, diposkan pada 4 Mei 2012 pukul 17:36 WIB, diakses pada 31 Juli 2012.
- Nahdliyyul Izza, *Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Novi Hasanah, *Dampak Kehadiran Plaza Ambarukmo Terhadap Aktivitas Jual Beli Di Pasar Tradisional Gowok Yogyakarta*, makalah Program Beastudi Kajian Antarbudaya/ Antarregional, Pusat Studi Asia Pasifik UGM, Yogyakarta, 2009.
- Nugroho Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, Dan Keinginan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2009 tentang Penataan Toko Modern Di Kabupaten Bantul.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010  
tentang Pengelolaan Pasar.

Robert R Mayer dan Ernest Greenwood *Rancangan Penelitian  
Kebijakan Sosial*. (terj.), Pustekom Dikbud dan C.V  
Rajawali, Jakarta, 1984.

# KETENTUAN PENULISAN JURNAL

Redaksi Jurnal PMI menerima tulisan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Artikel dapat berupa hasil penelitian ataupun gagasan yang bertemakan persoalan sosial, strategi, dan model alternative dalam pengembangan masyarakat.
2. Artikel belum pernah diterbitkan di media lain dan tidak mengandung unsur plagiat. Dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
3. Naskah diketik di kertas HVS kwarto sebanyak 15 sampai 20 halaman spasi ganda.
4. Artikel dapat ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Menggunakan model transliterasi yang digunakan oleh Jurnal PMI-EYD.
5. Artikel minimal memuat, judul, nama penulis dan identitas (institusi atau alamat e-mail dalam bentuk catatan kaki), abstrak, kata kunci, Pengantar (minimal latar belakang), temuan/pembahasan dalam subbab-subbab, kesimpulan, dan daftar pustaka.
6. Referensi dapat ditulis menggunakan catatan samping dan jika perlu penjelasan dapat menggunakan catatan kaki.
7. Daftar pustaka hanya berisi pustaka yang dirujuk dan disusun berdasarkan urutan alfabetis dengan tata urutan minimal sebagai berikut.

Pajar Hatma Indra Jaya, *Raja Di Tengah Gelombang Demokrasi: Loyalitas, Perubahan Sosial & Kepentingan*, Pustaka Publiser dan Jurusan PMI, Yogyakarta, 2012.

M. Noor Romadlon, Art (Batik) Under Pressure dalam *Jurnal Riset Daerah*, Edisi Khusus Vol.I No.1 Desember Tahun 2012.

<http://www.antaranews.com>, diakses pada tanggal 31 Juli 2012.

8. Artikel dikirim berupa file dalam format Rich Text Format atau Microsoft Word ke papinmbantul@yahoo.com.
9. Artikel ditulis dengan huruf Time New Roman/Time New Arabic ukuran 12.
10. Kepastian pemuatan atau penolakan artikel diberitahukan secara tertulis melalui e-mail. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan.
11. Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapat tiga buah eksemplar Jurnal PMI dengan syarat memberi kontribusi biaya cetak minimal sebesar Rp. 100.000,- atau mendapat satu eksemplar tanpa uang kontribusi cetak.
12. Jurnal PMI dapat diakses melalui <http://journal.uin-suka.ac.id/jurnalpmi/index>